

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 80/PUU-  
XVII/2019 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 76/PUU-  
XVIII/2020 TENTANG RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI  
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***

**SKRIPSI**



Oleh:

**WIDYNINGSIH NUR CHASANAH**

**103200042**

Pembimbing:

**SESARIO AULIA, M.Kn.**

**NIP 199104252019031022**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**



**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 80/PUU-  
XVII/2019 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 76/PUU-  
XVIII/2020 TENTANG RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI  
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

Ponorogo

Oleh:

**WIDYNINGSIH NUR CHASANAH**  
**103200042**

Pembimbing:

**SESARIO AULIA, M.Kn.**  
**NIP 199104252019031022**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**UJIAN SKRIPSI**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Widyningsih Nur Chasanah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
NIM : 103200042  
Judul : **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NO. 80/PUU-XVII/2019  
DAN PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NO.76/PUU-XVIII/2020  
TENTANG RANGKAP JABATAN  
WAKIL MENTERI PERSPEKTIF  
FIQH SIYASĀH**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 15 November 2024

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara



Martha Eri Safira, S.H., M.H.  
NIP. 19820729200901201

Menyetujui,  
Pembimbing

Sesario Aulia, M.Kn.  
NIP. 199104252019031022

**PONOROGO**

### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widyningsih Nur Chasanah

NIM : 103200042

Fakultas : Syariah

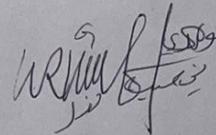
Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 dan  
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020 tentang  
Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif *Fiqh Siyāsah*

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 16 Desember 2024



Widyningsih Nur Chasanah

103200042



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Widyningsih Nur Chasanah

NIM : 101200148

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XVII/2019  
dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020  
tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif *Fiqh Siyāsah*

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari pernyataan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Desember 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. (  )
2. Penguji I : Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I. (  )
3. Penguji II : Sesario Aulia, M.Kn. (  )

Ponorogo, 11 Desember 2024

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Susniati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 1974081702000032001

PONOROGO

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widyningsih Nur Chasanah

NIM : 10320042

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 dan  
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020 Tentang  
Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Fiqh Siyash

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Sragen, 14 November 2024

  
METERA  
TELEPON  
45AMX015309953  
**Widyningsih Nur Chasanah**  
10320042

PONOROGO

## MOTTO

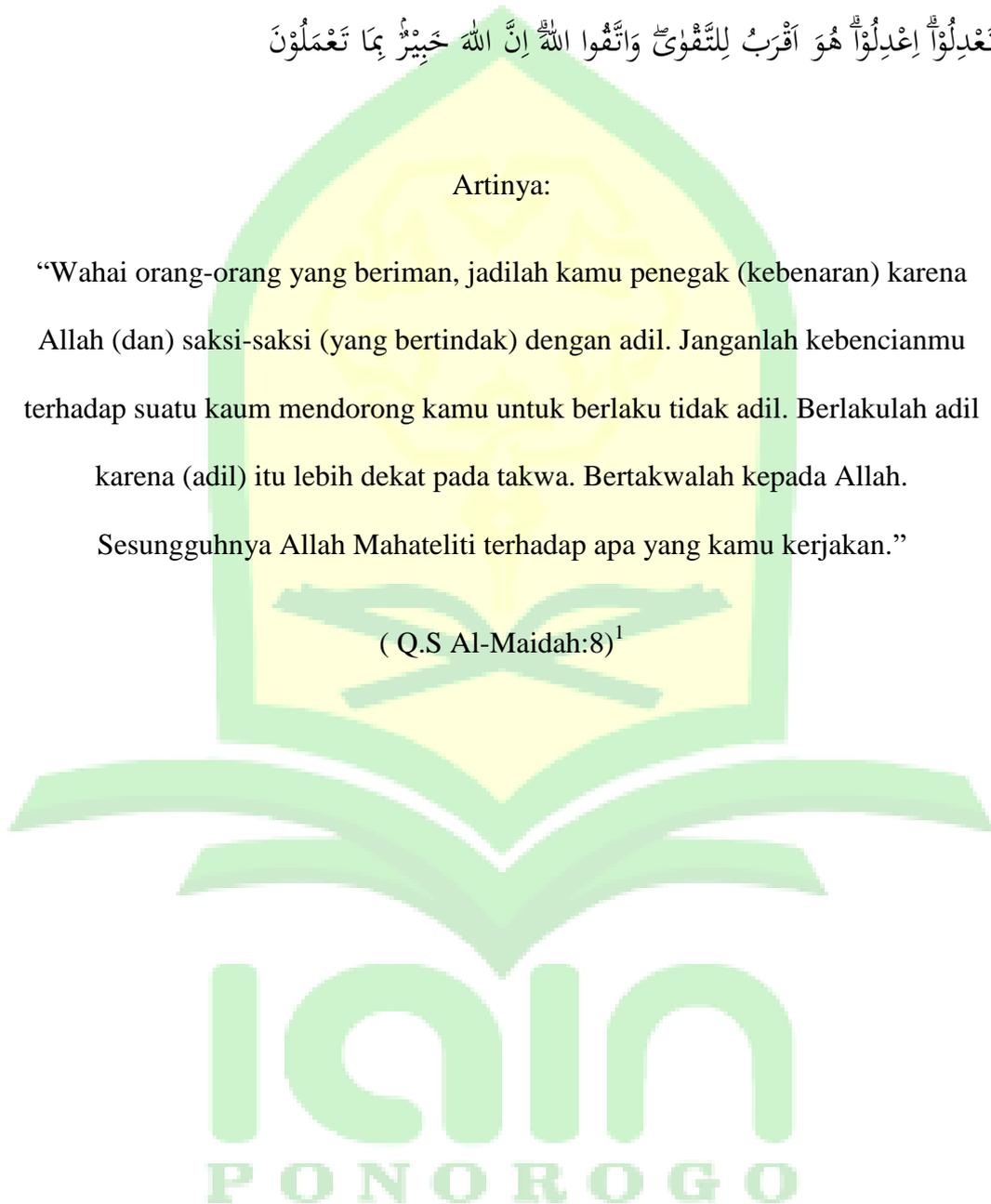
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا

تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

( Q.S Al-Maidah:8)<sup>1</sup>



<sup>1</sup>QS. Al-Maidah ayat 8, dalam <https://quran.nu.or.id/al-maidah/8>, (diakses pada tanggal 4 Desember 2024)

## PERSEMBAHAN

Puji syukur *Alhamdulillah* atas kehadiran Allah SWT atas segala kenikmatan, kesehatan, kekuatan, kesabaran, iman, Islam, ilmu, dan pertolongannya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam tetap turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang melawan kejahiliah sehingga kita dapat berada pada zaman yang terang benderang ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama dalam bidang Pendidikan Al-Qur'an. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Wakidi Harso Utomo dan Ibu Sunarti yang selalu menyemangati, membimbing dan mendoakan kelancaran saya hingga saat ini.
2. Kakak dan adik saya Nanang Taufik dan Ria Nadhila Umah serta Dedy Hernawan yang selalu mendoakan dan menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak/ibu dosen yang telah membimbing saya sampai semester akhir ini. Terkhusus kepada pembimbing skripsi Bapak Sesario Aulia, M.Kn. yang senantiasa memberikan arahan dalam setiap langkah mengerjakan skripsi semoga Allah memberikan kebaikan kepada beliau. Saya ucapkan terimakasih atas ilmu dan saran serta nasihat yang telah bapak berikan kepada saya.

## ABSTRAK

**Chasanah, Widyningsih Nur** 2024. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020 tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Fiqh Siyāsah*. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Sesario Aulia, M.Kn.

**Kata Kunci/Keywords:** Rangkap Jabatan, Wakil Menteri, *Fiqh Siyāsah*.

Skripsi ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020 penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan terjadinya pengujian kembali Putusan Mahkamah Konstitusi tentang larangan rangkap jabatan wakil menteri dengan menggunakan teori *fiqh siyāsah*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap pengujian kembali tentang rangkap jabatan wakil menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020?, 2) Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang rangkap jabatan wakil menteri?.

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan normatif dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku, jurnal, penelitian terdahulu, serta bahan hukum (peraturan perundang-undangan). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan data mengenai tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pengujian kembali putusan mahkamah konstitusi tentang larangan rangkap jabatan wakil menteri dan implemtasi putusan mahkamah konstusi tentang rangkap jabatan wakil menteri perspektif *fiqh siyāsah*.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan 80/PUU-XVII/2019 dan 76/PUU-XVIII/2020 terkait larangan merangkap jabatan Wakil Menteri yang bertentangan dengan hukum dan keadilan dalam pemerintahan. Meskipun telah ada aturan yang jelas, praktik merangkap jabatan terus terjadi dan menimbulkan kontroversi. Dalam konteks *fiqh siyāsah*, peran Wakil Menteri dalam pemerintahan Islam dibahas serta konsekuensi pelanggaran seperti peringatan, pencabutan kewenangan, dan pemecatan. Pentingnya kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga pemerintahan yang adil dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan juga ditekankan.

IAIN  
P O N O R O G O

## KATA PENGANTAR

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

*Alhamdulillah* puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020 Tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif *Fiqh Siyāsah*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dengan adanya Larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri dapat menjaga integritas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara formil maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof Dr. Hj. Evi Muaviah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I selaku dekan FASYA IAIN Ponorogo.
3. Dr. Martha Eri Safira, S.H. M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Sesario Aulia, M.Kn. selaku Pembimbing skripsi yang selalu memberikan motivasi dan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak/ibu dosen, dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

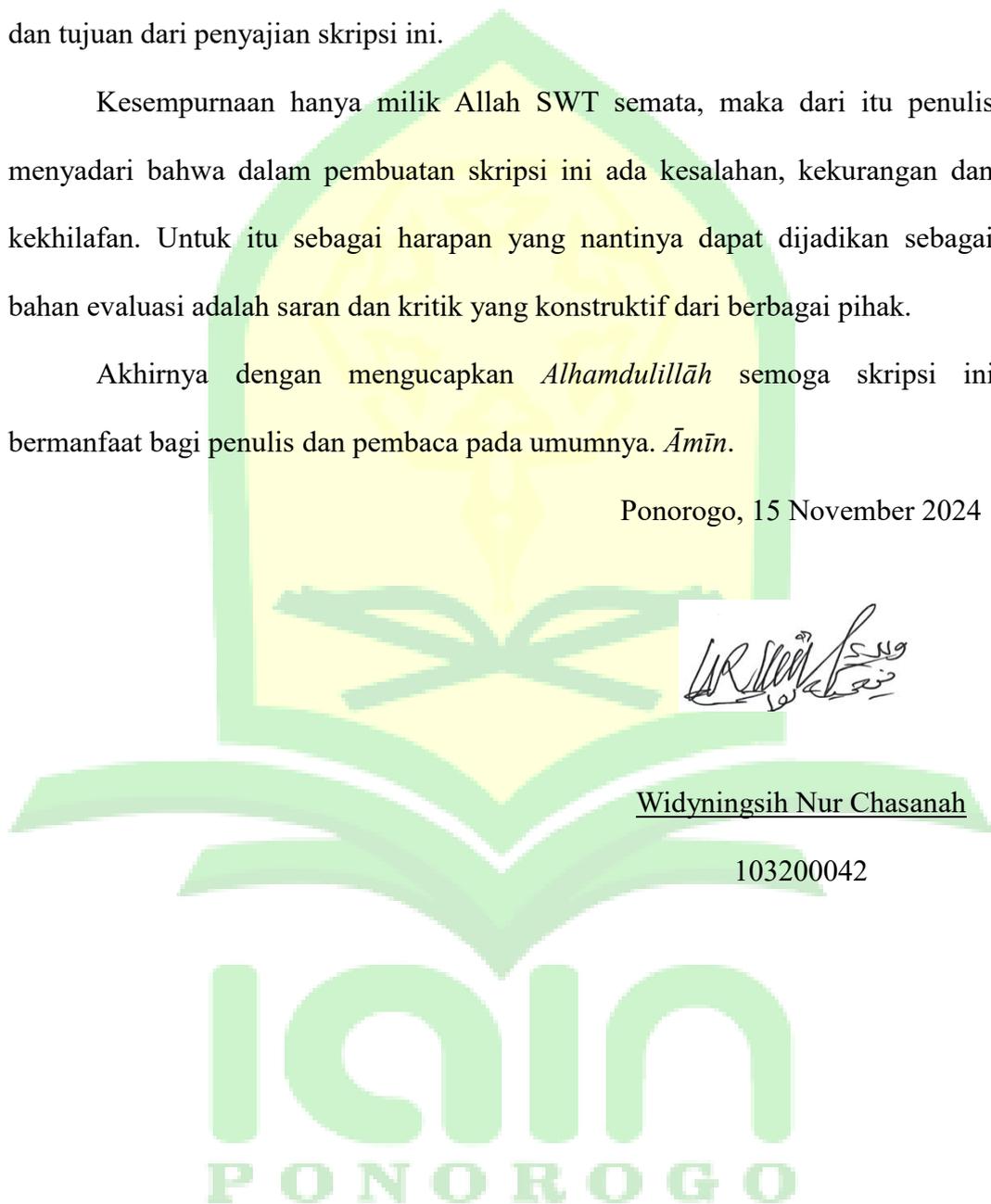
Akhirnya dengan mengucapkan *Alhamdulillah* semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Āmīn*.

Ponorogo, 15 November 2024



Widyningsih Nur Chasanah

103200042



IAIN  
PONOROGO

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo sebagai berikut:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind	Arab	Ind	Arab	Ind	Arab	Ind
ء	'	د	D	ض	ḍ	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	T	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	ẓ	م	M
ث	Th	ز	Z	ع	'	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	ه	H
ح	ḥ	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	Kh	ص	ṣ	ق	Q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan mennuliskan coretan horisontal di atas huruf ā, ī dan ū.

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh: *Bayna, 'layhim, qawl, mawḍū'ah*

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh; Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn `inda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna `inda Allāhi al-Islāmu*. .... *Fahuwa wājib* bukan *Fahuwa wājibu* dan bukan pula *Fahuwa wājibun*

6. Kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh;

- a. *Na'at* dan *Muḍāfilayh*: *Sunnah sayyi'ah, al-maktabah almiṣriyah*.
  - b. *Muḍāf*: *Maṭba'at al-āmmah*.
7. Kata yang berakhir dengan *ya' mushaddadah* (*ya' bertashdid*) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā' marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *ya' bertashdid* berada ditengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh;

- a. *al- Ghazālī, al-Nawāwī*
- b. *Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah*.
- c. *Sayyid, mu'ayyid, muqayyid*.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II KAJIAN TEORI <i>FIQH SIYĀSAH</i> .....</b>	<b>23</b>
A. <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	23
B. <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> .....	26

### **BAB III ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **MENGENAI RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI PERSPEKTIF**

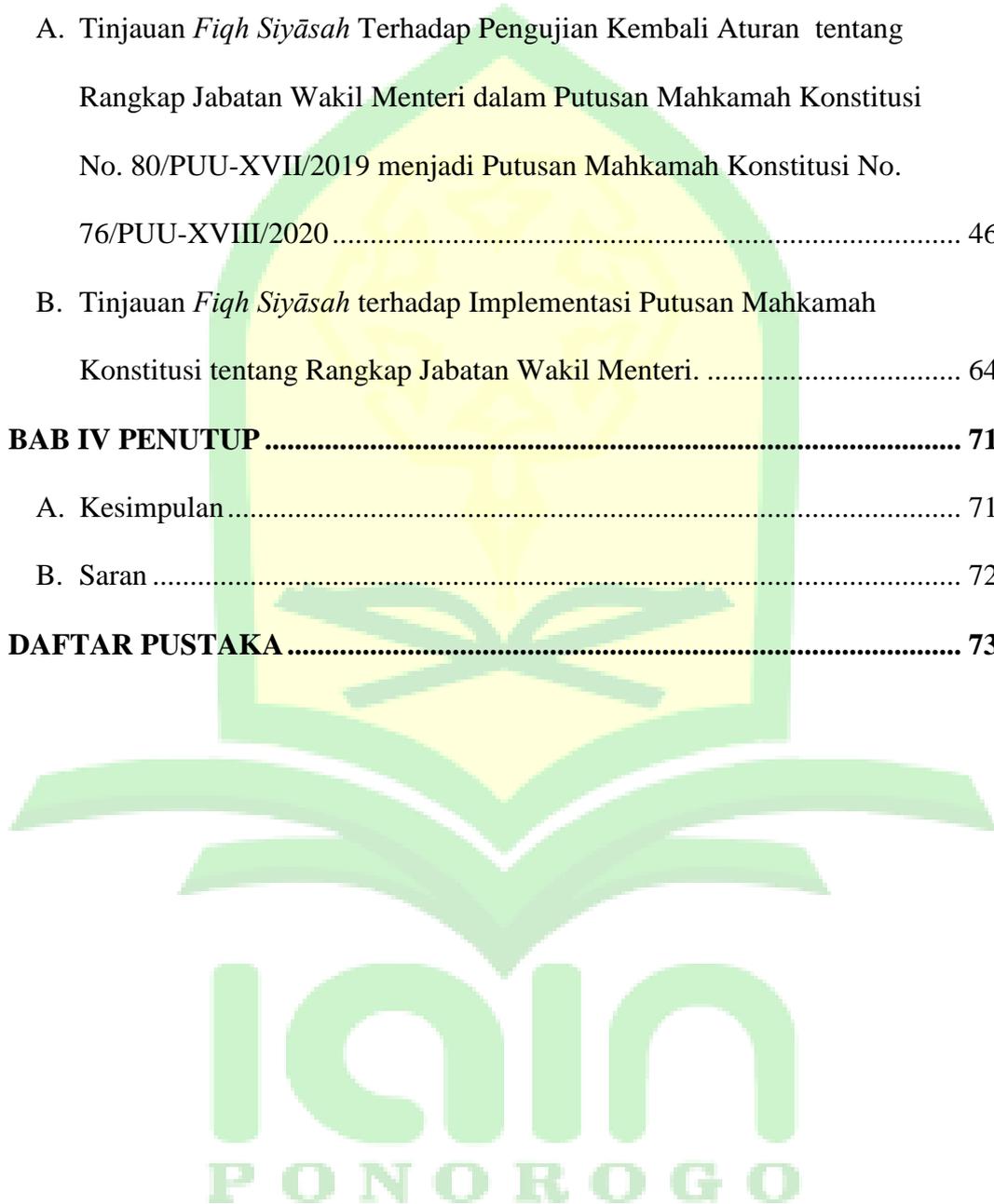
#### ***FIQH SIYĀSAH*..... 46**

- A. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pengujian Kembali Aturan tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020 ..... 46
- B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri. .... 64

#### **BAB IV PENUTUP ..... 71**

- A. Kesimpulan ..... 71
- B. Saran ..... 72

#### **DAFTAR PUSTAKA ..... 73**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wakil menteri merupakan pejabat pemerintah yang berada dilembaga eksekutif, dan kedudukannya dibawah Menteri. Istilah Wakil menteri pertama kali digunakan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yaitu didalam kabinet Presidensial, yang menyebutkan ada dua Wakil menteri yang diangkat, diantaranya wakil menteri dalam negeri yaitu bapak Harmani dan Wakil Menteri Penerangan yaitu bapak Ali Satroamidjojo.<sup>1</sup> Setelah itu istilah Wakil menteri tidak digunakan lagi pada masa Orde Lama hingga Orde Baru, dan istilah jabatan wakil menteri muncul kembali pada masa Reformasi yaitu di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai sekarang.<sup>2</sup> Kembalinya Jabatan Wakil Menteri sebab didasarkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan bahwa “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu.”<sup>3</sup> Wakil Menteri merupakan penjabat karir yang tidak berasal dari kabinet serta proses pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden dalam hak prerogatifnya. Tujuan diangkatnya Wakil Menteri adalah

---

<sup>1</sup>Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Kabinet Presidensial,” dalam <https://setkab.go.id/kabinet-presidensial/>, (diakses pada tanggal 27 November 2024).

<sup>2</sup>Mahatma Chryshna, “Wakil Menteri, Menteri Muda, dan Menteri Negara dalam Kabinet di Indonesia,” *kompas.id*, dalam <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/10/30/wakil-menteri-menteri-muda-dan-menteri-negara-dalam-kabinet-di-indonesia>, (diakses pada tanggal 6 Desember 2024).

<sup>3</sup>Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

untuk mengurangi tanggung jawab yang semakin besar yang ditanggung oleh lembaga kementerian dalam melaksanakan tugas negara.

Dengan adanya jabatan Wakil Menteri, akan berdampak bagi Lembaga Kementerian, sebab bisa menjadi alternatif dalam membantu pemerintah untuk membawa negara menjadi lebih baik. Dalam tugasnya Wakil Menteri diperlukan dalam menunjang upaya pemerintahan untuk memberi pelayanan yang maksimal untuk masyarakat. Namun dalam implementasinya, eksistensi dari jabatan wakil menteri mulai menimbulkan polemik. Ini disebabkan oleh aspek politis dalam penunjukan dan pengangkatan Wakil Menteri, karena pada pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kementerian Negara yang menyatakan seperti berikut ini:<sup>4</sup>

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara;
2. Presiden yang mengangkat serta memberhentikan menteri-menteri negara;
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Bahwa pada pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak disebutkan Presiden dibantu oleh Wakil Menteri. Hal tersebut berdampak pada kebingungan masyarakat terhadap kedudukan Wakil Menteri dikarenakan wakil menteri secara langsung diangkat sama Presiden bukan dari Menteri. Tidak hanya itu Wakil Menteri juga membawa polemik lainnya karena banyak Wakil Menteri yang merangkap jabatan. Ini terbukti dengan empat wakil

---

<sup>4</sup>Pasal 17 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tentang Kementerian Negara.

menteri yang diangkat menjadi komisaris perusahaan milik negara, mereka adalah Rosan P Roeslani yang merupakan pejabat wakil menteri Badan Usaha Milik Negara yang merangkap jabatan menjadi komisaris di PT Pertamina; Suahasil Nazara yang merupakan pejabat Wakil Menteri Keuangan yang merangkap jabatan menjadi komisaris PT PLN; Muhammad Herindra yang merupakan pejabat wakil menteri pertahanan yang merangkap jabatan menjadi komisaris PT Len Industri; dan Kartika Wirjoatmodjo yang merupakan wakil menteri Badan Usaha Milik Negara yang merangkap jabatan menjadi komisaris PT BRI.<sup>5</sup> Seperti halnya jabatan Menteri yang memiliki aturan larangan merangkap jabatan, namun, posisi Wakil Menteri tidak diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Hal ini merujuk pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menetapkan bahwa seorang Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:<sup>6</sup>

1. Pejabat negara lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Komisaris atau direksi di perusahaan milik negara atau perusahaan swasta; atau
3. Pemimpin organisasi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

---

<sup>5</sup>Ninuk Cucu Suwanti, "ICW Beberkan 4 Wakil Menteri Rangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN, padahal Putusan MK Melarangnya," *kompas.id*, dalam <https://www.kompas.tv/nasional/452844/icw-beberkan-4-wakil-menteri-rangkap-jabatan-sebagai-komisaris-bumn-padahal-putusan-mk-melarangnya?page=all>, (diakses pada tanggal 1 Desember 2024).

<sup>6</sup>Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Faktanya ketidak jelasan posisi Wakil Menteri dalam Lembaga Kementerian, memunculkan berbagai kritik dari masyarakat bahwa pemerintah tidak patuh terhadap pertimbangan yang tertera pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yaitu hakim konstitusi menyatakan bahwa mengenai kenyataan yang dijelaskan pemohon dalam putusan tersebut yaitu seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri juga diberlakukan untuk wakil menteri sebagaimana dijelaskan pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara.<sup>7</sup>

Dalam kenyataannya, pemerintah gagal menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, yang menimbulkan kekecewaan masyarakat. Akibatnya, masyarakat melakukan pemeriksaan hukum terhadap pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wakil menteri. karena didalam praktiknya Wakil Menteri tetap merangkap jabatan maka dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa menurut pendapat pemerintah penetapan mahkamah mengenai pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara tersebut hanya untuk anjuran dan tidak terikat.<sup>8</sup>

Dari pengujian kembali pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara pada kedua putusan tersebut mengukuhkan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pemerintahan. Putusan ini melarang rangkap jabatan

---

<sup>7</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang Larangan Rangkap jabatan Wakil Menteri, 96.

<sup>8</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 tentang Larangan Rangkap jabatan Wakil Menteri, 16.

untuk menghindari konflik kepentingan dan untuk memastikan bahwa pejabat publik, terutama wakil menteri melakukan pekerjaan mereka dengan baik.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam *Fiqh Siyāsah* memberi kerangka pemikiran yang memperkaya pemahaman tentang pengelolaan kekuasaan secara etis dan bermartabat. Dalam konteks ini, *Fiqh Siyāsah* memberikan panduan berharga yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Sunnah*, menekankan prinsip-prinsip keadilan, *amanah*, dan kemaslahatan.<sup>9</sup> Hal ini relevan dengan larangan rangkap jabatan yang bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan, memastikan fokus kerja pejabat publik, serta mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai moral dan agama. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip ini bukan hanya untuk mencapai efisiensi dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga untuk memenuhi tujuan yang lebih luas, yakni menjaga harmoni antara kepentingan individu, masyarakat, dan nilai-nilai spiritual yang menjadi dasar kehidupan bernegara.

Permasalahan rangkap jabatan wakil menteri dapat dilihat dari sudut pandang politik Islam, yang membahas tentang pembagian tugas dalam kekuasaan, yaitu kekuasaan yudikatif (*as-sulṭah al-qadhā'iyah*) dan kekuasaan eksekutif (*as-sulṭah al-tanfiziyyah*). *As-sulṭah al-qadhā'iyah* bertugas untuk menyelesaikan sengketa,<sup>10</sup> seperti peran hakim dalam memutuskan pengujian kembali putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-

---

<sup>9</sup>Mualif, "Prinsip-Prinsip Hukum Islam," dalam <http://an-nur.ac.id/prinsip-prinsip-hukum-islam/>, (diakses pada tanggal 11 Desember 2024).

<sup>10</sup>La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah AL-Qada'iyah," *Journal Tahkim*, 1 (Juni 2017), 169.

XVIII/2020. Sementara itu, *as-sultāh al-tanfiziyyah* bertugas menjalankan Undang-Undang,<sup>11</sup> yang dalam konteks ini terkait dengan tanggung jawab wakil menteri dalam melaksanakan tugasnya secara optimal. Oleh karena itu, putusan ini bukan hanya penting secara konstitusional, tetapi juga memiliki nilai etis dan moral yang relevan dalam perspektif hukum Islam.

Maka dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020” tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif *Fiqh Siyāsah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan berikut dapat dirumuskan sesuai dengan masalah yang diperoleh dari penulis melalui latar belakang yang telah diberikan yaitu:

1. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pengujian kembali tentang rangkap jabatan Wakil Menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang rangkap jabatan wakil menteri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Didasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini yaitu:

---

<sup>11</sup>Ibid., 158.

1. Menjelaskan bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pengujian kembali rangkap jabatan wakil menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020.
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap implementasi putusan mahkamah konstitusi tentang pangkap jabatan wakil menteri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adanya maksud tujuan penulis tersebut maka faedah yang diinginkan: adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai rangkap jabatan wakil menteri dari perspektif *fiqh siyāsah* memberikan banyak manfaat. Penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur hukum Islam tetapi juga memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dan peneliti dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan publik yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat luas yakni sebagai berikut:

- a. Pengembangan ilmu *fiqh siyāsah*: Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu *fiqh siyāsah* dengan memberikan contoh kasus kontemporer yang relevan. Kajian mengenai rangkap jabatan Wakil Menteri memberikan wawasan baru tentang bagaimana prinsip-prinsip *fiqh siyāsah* diterapkan dalam konteks *advanced*.
- b. Penegasan prinsip keadilan dan akuntabilitas: Penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi

mengenai rangkap jabatan Wakil Menteri, penelitian ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat dijaga melalui regulasi yang mencegah konflik kepentingan.

- c. Panduan bagi pembuat kebijakan: Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh siyāsah*. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya legitimate tetapi juga etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang rangkap jabatan wakil menteri dari perspektif *fiqh siyāsah* memberikan banyak manfaat. Penelitian ini tidak hanya membantu dalam peningkatan efektivitas pemerintahan dan pencegahan konflik kepentingan, tetapi juga mendorong pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan umum dan penerapan prinsip *syari'ah* dalam kebijakan publik. Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan yang berharga bagi pembuat kebijakan dan pejabat publik dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih baik dan bertanggung jawab diantaranya dengan cara sebagai berikut:

- a. Pembentukan regulasi yang lebih baik: Temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk membentuk regulasi yang lebih baik mengenai larangan rangkap jabatan, tidak hanya bagi wakil menteri tetapi juga pejabat publik lainnya. Regulasi yang jelas dan berdasarkan pada prinsip *fiqh siyāsah* akan lebih mudah diterima dan diimplementasikan.

- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pemerintahan: Dengan fokus pada satu jabatan, pejabat publik dapat mengembangkan kemampuan dan kompetensi mereka lebih baik. Penelitian ini mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya di pemerintahan melalui pengaturan yang lebih baik tentang jabatan publik.
- c. Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi: Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem pengawasan dan evaluasi dalam pemerintahan. Dengan memahami pentingnya fokus dan akuntabilitas, sistem pengawasan dapat diperbaiki untuk memastikan pejabat publik bekerja sesuai dengan tanggung jawab mereka tanpa adanya konflik kepentingan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah analisis penelitian sebelumnya yang relevan dengan peneliti. Maka dari itu penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian, diantaranya:

Pertama, karya ilmiah berupa skripsi yang disusun oleh Amalia Endah Rizky pada tahun 2022 di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dari Perspektif *Siyāṣah Dusturiyyāh*." Penelitian ini membahas permasalahan terkait rangkap jabatan Wakil Menteri sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 perspektif *siyāṣah dusturiyyāh*. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kebijakan pemerintah yang lebih tegas

harus dibuat untuk mencegah wakil menteri merangkap jabatan. Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak bolehnya merangkap jabatan sebagai Menteri yang tertera pada Undang-Undang Kementrian Negara berlaku juga bagi Wakil Menteri. Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 hanya mengatur mengenai larangan merangkap jabatan bagi menteri. Oleh karena itu, hakim Mahkamah Konstitusi membuat keputusan berdasarkan tafsir terhadap Undang-Undang di bawah payung Undang-Undang Kementerian Negara. didalam perspektif hukum Islam, dilarangnya *siyāsah dustūriyyah* terkait rangkap jabatan sebagai Wakil Menteri berdasarkan pada otoritas yang berwenang serta berpegang pada prinsip bahwa "menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan bersama".<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Endah rizky berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaanya terletak pada fokusnya penelitian, pada penelitian Amalia Endah fokus pada putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU-XVII/2019. Sementara penelitian saya fokus pada perubahan aturan dan implentasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU-XVII/2019 menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi No 76/PUU-XVIII/2020. Perbedaan selanjutnya terletak padak pada teori penelitian, pada penelitian Amalia Endah menggunakan teori *Siyāsah Dustūriyyah*. Sementara penelitian ini menggunakan teori *Fiqh Siyāsah*.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Nizamuddin Sidqi yang berjudul "Rangkap Jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Komisaris Badan

---

<sup>12</sup>Amalia Endah Rizky, Analisis Yudiris Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Siyāsah Dusturiyyah, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), 66.

Usaha Milik Negara Perspektif Hukum Positif dan *Maslahah*.” Didalam penulisan ini masalah yang dirumuskan adalah bagaimana perspektif hukum positif dan perspektif *mashlahah* tentang pegawai negeri sipil yang merangkap jabatan sebagai komisaris di badan usaha milik negara. Hasil dari penulisan ini ialah Ketidak selarasan antara Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04.2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 mengenai Pegawai Negeri Sipil yang melakukan rangkap jabatan. Konflik norma ini dapat diselesaikan dengan teori preferensi hukum, yaitu asas *lex predominant ruin legi inferiori*. Kebaikan bersama itu seharusnya sejalan dengan tujuan syara' walaupun akan terjadi kontra dengan tujuan manusia, sebab dalam kebaikan bersama, manusia tidak selamanya berpacu pada tuntutan syara', namun berdasarkan dorongan diri. Dalam terjadinya rangkap jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara, dilihat dari pemahaman kemashlahatan akan memberi tempat kepada orang yang mahir di bidangnya, sedangkan kemadlaratan itu terjadi karena meraih pendapatan dua kali lipat disebabkan kerja lebih dari satu jabatan yang akan melahirkan masalah. dilihat dari banyaknya kemadlaratan, maka dari itu rangkap jabatan Pegawai Negeri Sipil

sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara tidak sesuai dengan *kemaslahatan*.<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizamuddin berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya terletak pada fokusnya penelitian, pada penelitian Muhammad Nizamuddin fokus dalam Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2005 mengenai Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Rangkap Jabatan. Sementara penelitian saya fokus pada perubahan aturan dan implementasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU-XVII/2019 menjadi Putusan MK No 76/PUU-XVIII/2020 mengenai larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri. Perbedaan selanjutnya terletak pada teori penelitian, pada penelitian Muhammad Nizamuddin menggunakan teori hukum positif dan *masalah mursalah*. Sementara penelitian ini menggunakan teori *Fiqh Siyāsah*.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Ika Fitrianita berjudul "Dualisme (Rangkap) Jabatan Wakil Menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU/XVII/2019 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara" membahas pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU/XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara, serta kedudukan dan wewenang jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam memutuskan perkara pengujian Undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Putusan

---

<sup>13</sup>Muhammad Nizamuddin Sidqi, Rangkap Jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara Perspektif Hukum Positif dan Mashlahah, *Thesis* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), 71.

Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU/XVII/2019 tidak mencantumkan larangan untuk merangkap jabatan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hakim Mahkamah tidak menemukan bukti yang mendukung argumen tentang kerugian konstitusional. Wakil Menteri bertanggung jawab untuk membantu Menteri dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh kementerian. Untuk menjalankan tugasnya, wakil menteri bertanggung jawab atas beban kerja yang berat, untuk mengangkat wakil menteri, perlu adanya: (a) Peraturan khusus yang mengatur wakil menteri; (b) Jabatan wakil menteri diberikan kepada birokrat yang berpengalaman; dan (c) Wakil menteri dapat sementara melepas jabatan sebelumnya sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Fitrianita berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya terletak pada fokusnya penelitian, pada penelitian Ika Fitria hanya fokus pertimbangan putusan Mahkamah konstitusi No 80/PUU-XVII/2019 dalam mengambil keputusan dan kedudukan wakil menteri dalam melaksanakan tugas pasca adanya putusan tersebut. Sementara penelitian penulis fokus pada alasan adanya pengujian kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU-XVII/2019 menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi No 76/PUU-XVIII/2020 dan Implementasinya dengan menggunakan teori *fiqh siyāsah*.

---

<sup>14</sup>Ika Fitrianita, Jayanti Puspitaningrum, dan Suwito, "Dualisme (Rangkap) Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara," *Journal of Law Review*, 1 (2022), 16.

Keempat, jurnal yang disusun oleh Sonia Sekar Sari, dkk dengan judul “*Disregarding the Protected Court Choice Concerning the Denial of Concurrent Delegate Serve Positions*”. Studi ini menyelidiki masalah tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang rangkap jabatan wakil menteri dan konsekuensi hukum dari rangkap jabatan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa, karena masih ada wakil menteri yang melakukan rangkap jabatan, pelaksanaan amanat tersebut tidak efektif. Hal seperti ini dapat dianggap sebagai ketidakpatuhan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. akibat hukum dan konsekuensi dari rangkap jabatan wakil menteri, termasuk pemberian sanksi administratif yang mencakup pemberhentian dari jabatannya. Selain itu, wakil menteri yang rangkap jabatan akan dihukum dan harus mengganti rugi keuangan negara karena mendapatkan gaji, pendapatan, dan kenikmatan yang tidak seharusnya berasal dari keuangan negara secara langsung atau tidak langsung.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sonia Sekar, dkk berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya terletak pada fokusnya penelitian, pada penelitian Sonia Sekar fokus dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap rangkap jabatan dan akibat hukum serta sanksi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2020. Sementara penelitian penyusun berfokus pada alasan adanya pengujian kembali pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020 dan implementasi pasca adanya kedua putusan tersebut.

---

<sup>15</sup>Sonia Sekar Sari dkk., “Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions: Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri,” *Jurnal Konstitusi*, 4 (2023), 45.

Perbedaan selanjutnya terletak pada teori penelitian, pada penelitian Sonia Sekar menggunakan hukum positif sementara penelitian ini menggunakan teori *fiqh siyāsah*.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Yuliana Windi Agustin dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik.” Didalam penelitian ini telah dirumaskan masalah yakni Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik ditinjau dari *fikih siyāsah*. Pencapaian dari penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 mengenai Larangan Rangkap Jabatan Dewan Perwakilan Daerah yang menjadi pengurus Partai Politik yang tertulis didalamnya yakni melarang adanya pengurus parpol untuk mengusulkan diri menjadi anggota Dewan perwakilan Daerah. Dalam keputusan ini, partai politik memiliki kepengurusan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat whitering rendah, semuanya sesuai dengan struktur organisasi partai politik yang relevan. Analisa *Fiqh Siyāsah* atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 mengenai Larangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk bergabung dengan Partai Politik Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi yang membahas larangan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berfungsi sebagai pengurus partai politik. Dalam Islam, Dewan Perwakilan Daerah tergabung dalam *sulṭah tasyri'iyah*, sebuah lembaga

otoritas. Dalam hal undang-undang no. 07 tahun 2017, pasal 182, huruf l, frasa "pekerjaan lain", Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang tersebut, hal ini sangat dibenarkan oleh hukum Islam. karena hal tersebut masuk kedalam *sulṭah qadhā'iyah* yang membahas terkait lembaga peradilan dalam islam.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Windi berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya terletak pada fokusnya penelitian, pada penelitian Yuliana Windi fokus dalam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik. Sementara penelitian saya fokus pada alasan terjadinya pengujian kembali terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU-XVII/2019 menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi No 76/PUU-XVIII/2020 tentang larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri sebagai komisaris perusahaan negara maupun perusahaan swasta dan implementasi dari putusan tersebut dengan menggunakan teori *fiqh siyāsah*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau dokumen, yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang didasarkan pada data kepustakaan atau data

---

<sup>16</sup>Yuliana Windi Agustin, Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai Pengurus Partai Politik, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 71.

sekunder.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, buku digunakan sebagai sumber informasi yang terkait dengan subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian, seperti skripsi, tesis, jurnal, artikel, dan sebagainya.

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan. Dengan adanya pendekatan, peneliti dapat mendapatkan informasi dari berbagai aspek masalah yang sedang diselidiki. Dua metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*The Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah (isu hukum) yang sedang dibahas.<sup>18</sup> Peraturan Perundang-Undang yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara.
- 2) Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical & Conceptual Approach*), Pendekatan ini melihat perspektif dan teori baru dalam ilmu hukum. Peneliti yang menggunakan pendekatan konseptual harus merujuk pada prinsip-prinsip hukum.<sup>19</sup> Konsep dalam penelitian ini yaitu Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap Pengujian Kembali

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* ( Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 23.

<sup>18</sup>Johani Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 300.

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2024), 134.

Tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 Menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020 dan tinjauan *fiqh siyāsah* mengenai implementasi putusan mahkamah konstitusi tentang rangkap jabatan Wakil Menteri.

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data

Untuk menyelesaikan masalah penelitian ini, informasi diperlukan. Information adalah segala keterangan (informasi) mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.<sup>20</sup> Untuk memecah masalah menjadi pembahasan pokok, penulis memerlukan informasi-informasi yaitu ada dua data diantaranya data mengenai tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pengujian kembali tentang rangkap jabatan wakil menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020 dan data mengenai tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang rangkap jabatan wakil menteri.

### b. Sumber data

Jenis sumber data hukum yang akan digunakan penulis dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data hukum sekunder. Berkenaan dengan data-data yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjar Masin: Antasari Press, 2011), 70.

### 1) Sumber data primer

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 adalah sumber data utama dalam penelitian ini.

### 2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder memberikan arahan dan penjelasan tentang data hukum primer, seperti Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dalam penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan adalah dua teknik diantaranya adalah yang pertama dengan pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan).<sup>21</sup> Karena penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, langkah pertama yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan bahan-bahan hukum adalah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji masalah yang dibahas dalam penelitian. Metode studi dokumen ini menggunakan analisis konten untuk mengumpulkan bahan melalui bahan-bahan hukum tertulis.

Selain itu, metode penelusuran data online yang digunakan untuk mengumpulkan data merupakan metode pengumpulan data yang relatif baru

---

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2024), 2.

dan merupakan salah satu opsi pengumpulan data penelitian yang sangat bermanfaat. Sangat penting bagi peneliti untuk memanfaatkan secara efektif jumlah besar data yang tersebar di internet, yang didistribusikan oleh individu, lembaga pemerintah, organisasi, dan lainnya. Selain itu, peneliti dapat menggunakan buku elektronik (*e-book*) dan jurnal elektronik (*e-journal*).<sup>22</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah metode analisis yang secara nyata digunakan dalam penelitian, dan ada alasan mengapa itu dilakukan. Setiap metode analisis bahan hukum diuraikan definisinya dan digunakan untuk menganalisis data, yang merupakan suatu proses penelitian mendalam. Meskipun biasanya dilakukan setelah data dikumpulkan, namun proses analisa dapat dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>23</sup>

Metode analisis normatif kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian. Metode ini menganalisis data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, dan efektif, dan kemudian dibahas. Analisis normatif kualitatif menjabarkan data berdasarkan teori, norma, dan prinsip hukum yang relevan dengan pokok bahasan.<sup>24</sup> Dalam hal ini penulis menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep umum yang terkandung dalam data hukum primer dan teori pendukung yang berupa pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan

---

<sup>22</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjar Masin: Antasari Press, 2011), 86.

<sup>23</sup>Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 103.

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Media Pratama, 2010), 98.

sengketa rangkap jabatan Wakil Menteri, kemudian menjelaskan tentang tinjauan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 berdasarkan konsep Undang-Undang yang lebih umum.

#### 5. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian pustaka pengecekan keabsahan data itu penting yakni memeriksa data yang telah dikumpulkan untuk memastikan data tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Keabsahan data dari jenis penelitian normatif dapat dicek dengan beberapa langkah yakni memperpanjang waktu penelitian, mengamati lebih teliti, menguji triangulasi dan uji referensi. Kriteria keabsahan data ada empat yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Uji kepercayaan (*kredibility*), adalah uji hasil dari data yang telah dihasilkan selama proses penelitian.
- b. Uji keteralihan (*tranferability*), adalah validasi eksternal yang menunjukkan sebuah derajat ketepatannya. Uji keteralihan ini bertujuan agar orang lain dapat memahami hasil penelitian.
- c. Uji kebergantungan (*dependability*), dalam penelitian kualitatif pengujian kebergantungan dilakukan dengan cara audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hal tersebut dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing yang mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

---

<sup>25</sup>Universitas Negeri Malang, "Keabsahan Data," dalam <http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/Keabsahan-Data-Kualitatif.pdf>, (diakses pada tanggal 10 September 2024).

- d. Uji kepastian (*confirmability*), yaitu diperoleh melalui persetujuan beberapa orang, termasuk pembimbing terhadap pendapat tentang hal hal yang berhubungan dengan fokus penelitian.

## **G. Sistematika Pembahasan**

### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan umum tentang penelitian ini. gambaran secara umumnya mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan keuntungan dari penelitian, serta metode penelitian, kajian literatur, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II: KAJIAN TEORI**

Dalam bab ini penulis akan membahas beberapa hal yang menjadi kajian umum tentang teori *fiqh siyāsah*.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas mengenai uraian data hasil penelitian dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai mengenai pengujian kembali putusan Mahkamah Konstitusi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 serta penerapannya dalam larangan rangkap bagi Wakil Menteri perspektif *fiqh siyāsah*.

### **BAB IV: KESIMPULAN**

Bab terakhir ini menguraikan tentang kesimpulan penulisan yang disertai dengan saran-saran menurut temuan penulis, telaah dan abstrak penelitian.

## BAB II

### KAJIAN TEORI *FIQH SIYĀSAH*

#### A. *Fiqh Siyāsah*

Secara *harfiah*, kata *As-siyāsah* memiliki arti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat aturan, pengawas, pengurus dan lain sebagainya. Secara istilah *fiqh siyāsah* adalah cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas tentang masalah-masalah politik, pemerintahan, dan pengelolaan negara sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>1</sup> Istilah ini berasal dari kata *Middle easterner "fiqh"* yang berarti pemahaman atau pengetahuan yang mendalam, dan "*siyāsah*" yang berarti politik atau administrasi negara. Dengan demikian, *fiqh siyāsah* berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta tata cara menjalankan pemerintahan yang adil dan sesuai dengan syariah Islam.

Landasan teori utama mengenai *fiqh siyāsah* yakni diambil dari *Al-Qur'an* dan *Hadist*. Jika tidak ada penjelasan di *Al-Qur'an* dan *Hadis*, *fiqh siyāsah* menggunakan metode-metode lain untuk mempelajarinya yaitu dengan cara sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. *Al-Qiyas*, dengan menggunakan metode *al-qiyas*, hukum dari suatu masalah dapat diterapkan dalam masalah lain pada masa dan tempat yang berbeda.
2. *Al-Maṣhlahah al-mursalah*, dapat digunakan dalam mengatur dan mengendalikan permasalahan yang tidak diatur oleh syariat Al-Qur'an dan

---

<sup>1</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, revisi (jakarta: Prenadamedia Grup, 2003), 25.

<sup>2</sup>Syaiful Amri, "Fiqh Siyasah," *Diklat*, ( Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2023), 5.

As-sunnah. Dalam penerapannya harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat, tanpa penelitian penggunaan *al-maslahah al-mursalah* tidak akan menimbulkan kemaslahatan, tetapi malah sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.

3. *Sadd al-dzari'ah* dan *Fath al-dzari'ah*, dalam *fiqh siyāsah*, *al-dzari'ah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadatan. Sebaliknya *fath al-Dzari'ah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.
4. *Al-Adah*, dalam *fiqh siyāsah* bisa diterapkan jika ada sesuatu hal yang terjadi secara berulang-ulang yang diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia.
5. *Al-Istihsan*, diartikan perubahan dalil yang digunakan mujtahid yakni dalam hubungan itu, dari dalil yang satu kedalil yang lain, yang lebih kuat diantara dua dalil.

Prinsip-prinsip hukum Islam yang secara tidak langsung disebutkan dalam AL-Qur'an dan Hadist yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Prinsip *Maslahah Mursalah*, prinsip ini menekankan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mencapai *maslahah* (kemanfaatan) bagi seluruh umat manusia.
2. Prinsip *adil* (keadilan), prinsip ini mengharuskan setiap orang diperlakukan secara adil dan setara dihadapan hukum, tanpa diskriminasi.

---

<sup>3</sup>Mualif, "Prinsip-Prinsip Hukum Islam," dalam <http://an-nur.ac.id/prinsip-prinsip-hukum-islam/>, (diakses pada tanggal 11 Desember 2024).

3. Prinsip *Amanah* (Kepercayaan), prinsip ini mengharuskan setiap orang untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Didalam kajian *fiqh siyāsah* ini meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ektern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>4</sup> Menurut beberapa ulama ruang lingkup *fiqh siyāsah* dibagi menjadi lima bidang, sementara yang lain mengidentifikasi empat atau tiga bidang pembahasan bahkan, sebagian ulama memecah cakupan kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang.<sup>5</sup> Namun, pandangan ini dianggap kurang esensial karena bersifat lebih teknis. Pembidangan *fiqh siyāsah* akan berubah sesuai dengan pola hubungan antarmanusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah. Menurut Prof. H.A Djazuli, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia menurut pengaturan siyasah dibagi menjadi tiga bagian objek kajian diantaranya:<sup>6</sup>

1. *Fiqh siyāsah Dustūriyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dalam batas-batas administratif suatu negara.

---

<sup>4</sup>Taufik Ghafar dan Heri Firmansyah, "Tinjauan Fiqh Siyasah pada Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah," *UNES Law Review*, 2 (2024), 7200.

<sup>5</sup>Heryanti, Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), 29.

<sup>6</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, revisi (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003), 31.

2. *Fiqh siyāsah dauliyyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
3. *Fiqh siyāsah māliyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

### **B. Siyāsah Dustūriyyah**

*Siyāsah dustūriyyah* secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *siyāsah* dan *dustūriyyah*. Kata *siyāsah* memiliki makna pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengelolaan, dan pengawasan. Sementara itu, *dustūriyyah* berarti undang-undang atau peraturan. Secara umum, *siyāsah dustūriyyah* merujuk pada tindakan kepala negara dalam menetapkan keputusan atau peraturan demi kemaslahatan umat. Menurut para ahli, *siyāsah dustūriyyah* adalah kebijakan atau aturan yang dibuat oleh kepala negara untuk mengatur rakyatnya.<sup>7</sup>

Persoalan *fiqh siyāsah dustūriyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok diantaranya:<sup>8</sup>

1. Dalil-dalil *kully*, meliputi ayat-ayat *Al-Qur'an* maupun *hadist*, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kully* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat.

---

<sup>7</sup>Selfi Merliani, *Pandangan Siyāsah Dustūriyyah terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Menertibkan Parkir Liar*, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021), 21.

<sup>8</sup>Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, revisi (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003), 47.

2. Aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Dari dalil-dalil *kully* dan aturan-aturan yang dapat berubah, *fiqh siyāsah dustūriyyah* dapat dibagi menjadi empat bidang kajian diantaranya bidang *siyāsah tasyri'iyah*, *siyāsah tanfīziyyah*, *siyāsah qadhā'iyah*, dan *siyāsah idāriyyah*.<sup>9</sup> Berikut penjelasannya:

1. Bidang *siyāsah tasyri'iyah*

Dalam *fiqh siyāsah*, kekuasaan legislasi atau dikenal sebagai *al-sulṭah al-tasyri'iyah* merujuk pada wewenang pemerintah Islam dalam merumuskan dan menetapkan hukum. Menurut ajaran Islam, tidak ada individu yang berhak membuat hukum yang akan diterapkan kepada umat Islam. Dalam konteks *fiqh siyāsah*, *al-sulṭah al-tasyri'iyah* adalah salah satu bentuk kekuasaan negara yang bertugas mengatur urusan kenegaraan, selain kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qadhā'iyah*).<sup>10</sup> Kekuasaan ini mencakup berbagai aspek, seperti representasi rakyat (*ahlu hali wal aqdi*), hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam satu negara, serta penyusunan konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksanaan, dan peraturan daerah.<sup>11</sup> Dalam hal ini, *al-sulṭah al-tasyri'iyah* mengacu pada kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan berdasarkan syariat Allah SWT. Dengan kata lain, kekuasaan ini merupakan bagian dari tugas *siyāsah syar'iyah*

---

<sup>9</sup>Ibid., 48.

<sup>10</sup>La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah," *Journal Tahkim* 13, no. 1 (Juni 2017): 158.

<sup>11</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, revisi (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003), 48.

untuk merumuskan hukum demi kemaslahatan umat, selaras dengan ajaran Islam.

Kewenangan dan tugas kekuasaan legislatif merupakan elemen utama dalam pemerintahan Islam. Hal ini dikarenakan keputusan dan kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif akan dijalankan secara efektif oleh lembaga eksekutif serta dijaga dan ditegakkan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Anggota lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid, ahli fatwa (mufti), dan pakar dalam berbagai disiplin ilmu.<sup>12</sup>

Karena otoritas penetapan syariat sepenuhnya adalah hak Allah, maka peran dan tugas lembaga legislatif terbatas pada upaya menggali dan memahami sumber-sumber utama syariat Islam, yaitu *Al-Qur'an* dan *Sunnah* Nabi, serta menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Setiap undang-undang dan peraturan yang disusun oleh lembaga legislatif harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua sumber syariat tersebut.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, *al-sulṭah al-tasyri'iyah* perlu diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selain tugas utamanya, lembaga legislatif juga memiliki kewenangan dalam bidang keuangan negara. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan pengawasan terhadap perbendaharaan negara, sumber devisa, serta anggaran pendapatan dan belanja negara yang dikelola oleh kepala negara sebagai

---

<sup>12</sup>Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qada'iyah," 158.

<sup>13</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Book, 2016), 92.

pelaksana pemerintahan. Lembaga legislatif juga memiliki hak untuk mengontrol kinerja lembaga eksekutif, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan terkait berbagai isu, menyampaikan pandangan untuk didiskusikan, serta meninjau dan memeriksa birokrasi.<sup>14</sup>

## 2. Bidang *siyāsah tanfīziyyah*

Dalam *fiqh siyāsah* Kekuasaan eksekutif disebut dengan *Al-Sulṭah al-Tanfīziyyah* yaitu lembaga yang menjalankan undang-undang. Dibidang *siyāsah tanfīziyyah* ini terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalīfah*, *imarah/'āmir*,<sup>15</sup> dan *wizārah/wāzīr*. berikut penjelasan mengenai bentuk kekuasaan eksekutif:

### a. *Imamah/ imam, khalīfah, dan imarah*

Menurut Al-Mawardi, *Imamah* adalah suatu posisi atau jabatan yang dibentuk untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga keberlangsungan agama dan mengatur urusan dunia.<sup>15</sup> *Khilafah* merujuk pada jabatan imam selama masa pemerintahan seorang *khalīfah* dan merupakan lembaga pemerintahan dalam Islam. Secara etimologis, *khilafah* berasal dari kata Arab *khalf*, yang berarti perwakilan, pengganti, atau pemimpin. Istilah ini digunakan dalam sejarah pemerintahan Islam sebagai institusi politik yang identik dengan *imamah*, yang berarti kepemimpinan atau pemerintahan. Dalam sejarah, *khilafah* mengacu pada pemerintahan yang dijalankan oleh para *khalīfah*, seperti *Khalīfah*

---

<sup>14</sup>La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfīziyyah, Al-Sulṭah AL-Qada'iyyah," *Journal Tahkim*, 1 (Juni 2017), 158.

<sup>15</sup>Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, revisi (jakarta: Prenadamedia Grup, 2003), 56.

Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan lainnya, untuk menjalankan *amanah* kepemimpinan yang diberikan kepada mereka. Dalam konteks ini, *khilafah* dapat bermakna pemerintahan atau institusi politik dalam sejarah Islam, baik dalam arti khusus maupun umum.<sup>16</sup>

Sementara *Imarah* berasal dari kata *amr*, yang berarti perintah, persoalan, urusan, atau dapat pula diartikan sebagai kekuasaan. Amir merujuk kepada individu yang memerintah, menangani persoalan, mengurus, atau menjadi penguasa. Oleh karena itu, muncul istilah *ulama dan umarā'*, di mana *umarā'* digunakan untuk menyebut para pemimpin yang memiliki kedudukan legal-formal dalam sebuah negara atau komunitas. Secara harfiah, *imarah* diartikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberi perintah kepada orang lain. Dalam pengertian istilah, *imarah* memiliki makna yang sama dengan *imamah* dan *khilafah*. Orang yang menjabat sebagai pemegang *imarah* disebut *amir*. Dalam konteks kepemimpinan Islam, kepala negara sering disebut sebagai *amîrul mu'minîn*. Gelar ini pertama kali digunakan oleh Umar bin Khaththab saat menggantikan Abu Bakar. Umar memilih untuk tidak menggunakan istilah *khalîfah* guna menghindari pengulangan makna dalam penggunaan kata tersebut.<sup>17</sup>

Menurut Imam Ar-Razi, sebagaimana dikutip oleh Muslim al-Yusuf dalam kitab *Mukhtâr ash-Shihâh*, menyatakan bahwa istilah

---

<sup>16</sup>Lendrawati, "Khilafah, Imarah dan Imamah dalam Konstelasi Politik Islam Analisis Komperatif tentang Wacana Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Al-Ahkam*, 2 (November 2021), 119.

<sup>17</sup>Moch. Fachrurroji, "Trilogi Kepemimpinan Islam," *Jurnal Ilmu Dakwah*, 12 (2008), 301.

*Khilafah, Imamah al-'Uzhma, dan Imarah al-Mukminin* memiliki makna yang sama. Ketiga istilah tersebut merujuk pada tanggung jawab yang serupa, yaitu sebagai otoritas tertinggi dalam kepemimpinan kaum Muslim.<sup>18</sup> Jadi menurut penulis Pengertian dari Imamah, Khilafah, dan Imarah itu sama walaupun ada perbedaan dalam penyebutannya disetiap pemerintahan Islam namun memiliki arti yang sama yaitu adalah seorang pemimpin dalam sejarah pemerintahan Islam.

Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa seorang imam dalam Islam memiliki dua hak utama diantaranya hak untuk ditaati dan hak untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, imam juga berhak menerima imbalan dari harta *baitul mal* guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara layak, sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.<sup>19</sup> Hak-hak seorang imam disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang menyatakan bahwa setiap Muslim wajib mendengar dan menaati pemimpinnya, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka, selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan hal yang bertentangan dengan syariat. Namun, jika pemimpin menginstruksikan untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar ataupun mentaatinya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Lendrawati, "Khilafah, Imarah dan Imamah dalam Konstelasi Politik Islam Analisis Komperatif tentang Wacana Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Al-Ahkam*, 2 (2021), 120.

<sup>19</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, revisi (jakarta: Prenadamedia Grup, 2003), 60.

<sup>20</sup>Ibid., 61.

Imam Al-Mawardi menguraikan sejumlah kewajiban seorang pemimpin atau imam, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Memelihara agama dengan menjaga dasar-dasar yang telah ditetapkan dan konsensus yang disepakati oleh generasi salaf.
- 2) Menegakkan keadilan dengan memutuskan hukum di antara pihak-pihak yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan agar keadilan berlaku secara menyeluruh.
- 3) Menjamin keamanan sehingga masyarakat dapat hidup tenang, mencari nafkah dengan nyaman, dan bepergian tanpa ancaman terhadap jiwa atau harta benda mereka.
- 4) Menegakkan hukum Allah, memastikan pelanggaran hukum dicegah, dan menjaga hak-hak masyarakat dari kerusakan atau kebinasaan.
- 5) Melindungi perbatasan negara dengan kekuatan yang memadai agar musuh tidak berani menyerang, termasuk melindungi darah kaum Muslim dan non-Muslim yang memiliki perjanjian damai (*mu'ahid*).
- 6) Memerangi pihak yang menentang Islam, setelah upaya dakwah dilakukan secara baik, jika mereka menolak masuk Islam maupun menjadi kafir *dzimmi*.
- 7) Mengumpulkan zakat dan pajak (*fay*) sesuai ketentuan syariat, berdasarkan nash atau hasil ijtihad, tanpa keraguan.
- 8) Menetapkan alokasi dana dari *baitul mal* secara wajar kepada yang berhak menerimanya dan memastikan distribusinya tepat waktu.

---

<sup>21</sup>Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (t.tp: Darul Falah, 2020), 23.

- 9) Menunjuk orang-orang yang jujur dan terpercaya untuk menjalankan tugas, termasuk pengelolaan kekayaan negara, agar pekerjaan dikerjakan oleh ahli dan harta negara terkelola dengan amanah.
- 10) Melaksanakan tugas secara langsung dalam membina umat dan menjaga agama, menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pemimpin.

Apabila seorang imam telah melaksanakan hak-hak umat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, secara otomatis ia juga telah menunaikan hak-hak Allah Ta'ala, hak-hak umat, serta kewajiban-kewajiban mereka. Jika hal tersebut telah terpenuhi, imam berhak mendapatkan dua hal dari umatnya. Pertama, ketaatan kepada dirinya. Kedua, dukungan selama ia tetap berada pada jalan yang benar. Namun, terdapat dua hal yang dapat merusak reputasinya sebagai pemimpin dan mengharuskan ia melepaskan jabatan imamah, yaitu adanya kekurangan dalam aspek keadilan dan cacat fisik.<sup>22</sup>

b. *Wizārah* atau *wāzir* (Kementerian)

Menteri dalam pemerintahan Islam terbagi menjadi dua jenis yaitu Menteri *tafwīdhi* (plenipotentiary, dengan mandat penuh) dan Menteri *tanfidzi* (pelaksana).<sup>23</sup> Menteri *tafwīdhi* adalah menteri yang diangkat oleh imam (khalifah) untuk melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sendiri. Pengangkatan jenis menteri ini dianggap sah, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah tentang Nabi Musa Alaihis-salam "Dan jadikanlah untukku seorang menteri

---

<sup>22</sup> Ibid., 26.

<sup>23</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, revisi (jakarta: Prenadamedia Grup, 2003), 78.

(pembantu) dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku." (Thaha: 29-32).<sup>24</sup>

Jika konsep ini relevan dalam kenabian, maka penerapannya dalam kepemimpinan (*imamah*) lebih masuk akal. Sebab, seorang imam (*khalīfah*) tidak mungkin mampu menangani semua urusan umat sendirian mengingat beratnya tanggung jawab yang diemban. Karena itu, pengangkatan menteri bertujuan untuk membantu imam dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi umat.

Sementara Pengangkatan *wāzīr tanfidzī* bertujuan untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan duniawi. Negara berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa posisi seorang Khalifah jauh lebih kuat dibandingkan rakyatnya. Oleh karena itu, *Khalīfah* atau kepala negara memiliki wewenang penuh untuk menunjuk atau mengangkat seorang wazir tanfidzi. Menurut al-Mawardi, peran *wāzīr tanfidzī* dalam sistem pemerintahan tidak terlalu signifikan. Hal ini karena *wāzīr tanfidzī* hanya berfungsi sebagai pelaksana tugas dengan otoritas yang sangat terbatas serta persyaratan yang minim, termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Otoritas tertinggi tetap berada di tangan *Khalīfah* atau presiden, yang bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan dan keputusan. Dengan demikian, *wāzīr tanfidzī* hanya bertugas

---

<sup>24</sup>QS. At-thaha ayat 29-32, dalam <https://quran.com/id/tha-ha/29-34>, (diakses pada tanggal 5 Desember 2024).

melaksanakan perintah yang diberikan oleh *Khalifah*, tidak memiliki wewenang untuk mengangkat pejabat yang terkait dengan tugas tersebut. Jika ia diikutsertakan dalam rapat atau diskusi, itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai menteri khusus.<sup>25</sup>

Namun, jika tidak dilibatkan, ia lebih berperan sebagai perantara atau wakil. Jabatan menteri *tanfidzi* tidak memerlukan proses pengangkatan formal, cukup dengan pemberitahuan. Selain itu, ia tidak diwajibkan memenuhi syarat seperti status merdeka (bukan budak) atau memiliki keahlian ilmu tertentu. Menteri ini juga tidak diberikan kewenangan untuk memegang kekuasaan atau mengangkat pejabat, sehingga syarat kemerdekaan menjadi tidak relevan. Ia juga tidak berwenang mengambil keputusan sendiri, sehingga syarat keilmuan pun tidak diperlukan. Fokus utamanya hanya pada dua hal yaitu menyampaikan laporan kepada imam (*khalifah*) dan melaksanakan perintah yang diberikan oleh imam.

Seorang Menteri *tanfidzi* (pelaksana) harus memiliki tujuh sifat utama, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) *Amanah*, Mampu menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya dan tidak berkhianat atau menipu ketika dimintai nasihat.

---

<sup>25</sup>Ariansyah dan Usman Jafar, “Kedudukan Menteri AD Interim dalam Sistem Pemerintahahan (Telaah Siyasah Syar’iyyah),” *Siyasatuna*, 1 (Januari 2022), 21.

<sup>26</sup>Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (t.tp: Darul Falah, 2020), 45.

- 2) Jujur, Ucapannya harus dapat dipercaya, sehingga orang yakin terhadap informasi yang disampaikannya dan menjauhi hal-hal yang dilarang berdasar pemberitahuannya.
- 3) Tidak tamak pada dunia, Memiliki sedikit keinginan terhadap hal-hal duniawi, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh suap atau terjebak dalam tindakan yang gegabah.
- 4) Bebas dari permusuhan, Tidak memiliki konflik atau percekocokan dengan orang lain, karena permusuhan dapat menghalangi seseorang bersikap adil dan menjalin hubungan yang baik.
- 5) Menyampaikan laporan, Bertugas melaporkan informasi kepada imam (*khalifah*) dan menyampaikan arahan atau keputusan dari imam kepada pihak lain, karena ia bertindak sebagai saksi imam.
- 6) Cerdas, Mampu memahami berbagai persoalan dengan jelas. Tanpa kecerdasan, tekad dan semangatnya tidak akan menghasilkan keputusan yang benar karena kurangnya pemahaman.
- 7) Bebas dari pengaruh hawa nafsu, Tidak membiarkan hawa nafsu memengaruhinya, karena hal tersebut dapat menyesatkannya dari kebenaran, membuatnya tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah, dan menipu akalnya hingga menjauhkannya dari keadilan.

Perbedaan antara menteri *tanfidzi* dengan menteri *tafwidhi* diantaranya sebagai berikut:<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, revisi (jakarta: Prenadamedia Grup, 2003), 78.

- 1) Menteri *tanfidzi* (pelaksana) tidak memiliki wewenang untuk mengangkat kembali pejabat yang telah dipecat atau memecat pejabat baru. Sebaliknya, Menteri *tafwīdhi* (*plenipotentiary*) memiliki hak untuk mengangkat kembali pejabat yang telah dipecat, memecat pejabat yang diangkat olehnya, namun tidak diizinkan memecat pejabat yang diangkat oleh imam (*khalīfah*).
- 2) Menteri *tanfidzi* juga tidak diperkenankan menandatangani dokumen atas nama dirinya sendiri atau imam, kecuali dengan izin dari imam (*khalīfah*). Sebaliknya, Menteri *tafwīdhi* dapat mendelegasikan penandatanganan kepada pegawainya atau pegawai imam, serta mewajibkan mereka menerima tanda tangannya. Namun, ia tetap tidak diperbolehkan menandatangani atas nama imam kecuali dengan izin yang spesifik, baik untuk urusan umum maupun khusus.
- 3) Jika imam (*khalīfah*) memberhentikan Menteri *tanfidzi*, pemberhentian tersebut tidak memengaruhi kedudukan para gubernur yang ada. Sebaliknya, jika Menteri *tafwīdhi* diberhentikan, hal ini berimplikasi pada pemberhentian pejabat-pejabat di bawah Menteri *tanfidzi*, namun tidak mencakup pejabat-pejabat di bawah Menteri *tafwīdhi*. Hal ini disebabkan karena pejabat di bawah Menteri *tanfidzi* berstatus sebagai wakil, sedangkan pejabat di bawah Menteri *tafwīdhi* memiliki status sebagai pejabat utama.

### 3. Bidang *siyāsah qadlā'iyah*

Dalam sistem hukum Islam, kekuasaan yudikatif merupakan salah satu pilar utama yang berfungsi menjaga pelaksanaan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kekuasaan ini, yang dikenal sebagai *al-sulṭah al-qadhā'iyah fī al-Islam*, tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa hukum antara individu atau kelompok, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa setiap aspek kehidupan umat Islam berjalan sejalan dengan aturan-aturan Allah SWT yang termuat dalam *Al-Qur'an* dan *Sunah*.<sup>28</sup>

Peradilan Islam, yang merepresentasikan kekuasaan yudikatif dalam sistem Islam, bertujuan menjaga harmoni sosial, menegakkan keadilan, dan mencegah kemungkaran melalui penerapan hukum Islam (*fiqh*) yang bersumber dari wahyu ilahi dan kesepakatan ulama (*ijma'*). Keunikan sistem peradilan Islam terletak pada pendekatan *ijtihad*, yang memungkinkan penyesuaian dan interpretasi hukum Islam agar relevan dengan konteks zaman dan tempat, sambil tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar serta nilai-nilai Islam.<sup>29</sup>

Menurut Mukti Arto menjelaskan lima alasan yang mendasari perlunya keberadaan lembaga peradilan syariah Islam diantaranya adalah:<sup>30</sup>

- a. Mengatasi Konflik Kepentingan; dalam kehidupan bermasyarakat, benturan kepentingan antar individu sering kali tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, secara praktis diperlukan lembaga yang mampu

---

<sup>28</sup>La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah AL-Qada'iyah," *Journal Tahkim*, 1 (Juni 2017): 169.

<sup>29</sup>Rifqi Qowiyul Iman dan joni, *Kekuasaan Yudikatif dalam Islam Qadha, Tahkim, Mazhalim dan Hisbah* (wawasan Ilmu, 2024), 1.

<sup>30</sup>Ibid., 37.

menyelesaikan sengketa tersebut, salah satunya melalui lembaga peradilan.

- b. Penegakan Aturan dalam Komunitas; setiap komunitas biasanya memiliki aturan hukum yang dirancang untuk menjaga ketertiban, melindungi kepentingan bersama, dan mempertahankan nilai-nilai yang dihormati. Namun, tekanan kepentingan sering memicu pelanggaran hukum, sehingga diperlukan sistem peradilan yang diakui oleh komunitas tersebut, dengan putusan yang memiliki kekuatan untuk ditegakkan. Seperti yang dinyatakan R. Tresna, "Di mana ada hukum, di sana harus ada hakim."
- c. Pilar Negara Hukum; pada era modern, hampir semua negara mendefinisikan diri sebagai negara hukum. Dalam konteks ini, pengadilan menjadi elemen fundamental, karena tidak ada negara hukum tanpa keberadaan lembaga peradilan.
- d. Kebutuhan Akan Profesionalisme dan Spesialisasi; penyelesaian sengketa memerlukan lembaga yang memiliki keahlian dan profesionalisme, baik dalam peradilan umum maupun khusus. Keterbatasan kemampuan manusia sebagai hakim mendorong pembentukan pengadilan khusus yang menangani kasus-kasus spesifik sesuai dengan bidangnya.
- e. Tuntutan Agama, selain alasan-alasan di atas, keberadaan lembaga peradilan juga didasarkan pada perintah agama untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai ajaran agama, dalam hal ini syariah Islam.

Mengenai Kriteria yang disepakati oleh para imam mazhab mengenai jabatan seorang hakim mencakup hal berikut diantaranya, memiliki akal yang sehat, telah mencapai usia baligh, berstatus merdeka, beragama Islam, memiliki pendengaran dan penglihatan yang normal, mampu berbicara dengan jelas, serta memiliki kecerdasan dan pemahaman mendalam terhadap hukum syariat.<sup>31</sup>

Menurut Al-Mawardi mengklasifikasikan sistem peradilan pada masanya berdasarkan cakupan otoritas dan wewenangnya menjadi empat jenis:<sup>32</sup>

- a. Hakim dengan otoritas umum, hakim ini memiliki kekuasaan yang tidak dibatasi oleh waktu, tempat, atau individu tertentu. Ia memiliki wewenang penuh untuk menangani semua perkara yang termasuk dalam domainnya tanpa batasan apapun.
- b. Hakim dengan otoritas khusus atau terbatas, hakim ini hanya memiliki wewenang dalam bidang tertentu yang telah ditetapkan. Misalnya, ia hanya menangani kasus berdasarkan pengakuan, tetapi tidak pada kasus yang melibatkan saksi, atau hanya menangani masalah utang-piutang tanpa kewenangan atas perkara *ahwal syakhshiyah* (perkara personal). Hakim ini hanya bertugas dalam cakupan bidang spesifik yang telah ditentukan dan tidak dapat menangani perkara di luar bidang tersebut.
- c. Hakim dengan otoritas umum di wilayah tertentu, hakim ini memiliki kekuasaan penuh seperti hakim dengan otoritas umum, tetapi

---

<sup>31</sup>Kartika Sari Dewi, "Syarat-Syarat Menjadi Hakim dalam Hukum Positif dan Hukum Islam," *Skripsi* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018), 24.

<sup>32</sup>*Ibid.*, 72–75.

wewenangnya hanya berlaku di wilayah atau daerah tertentu. Ia hanya dapat menangani perkara yang terjadi di dalam lingkup wilayah tugasnya.

- d. Hakim dengan wewenang terbatas pada individu atau waktu tertentu, hakim ini hanya bertugas menangani kasus-kasus yang melibatkan orang-orang tertentu atau pada waktu tertentu, seperti hanya berwenang pada hari-hari tertentu, misalnya hari Sabtu. Di luar waktu atau lingkup tersebut, ia tidak memiliki otoritas.

Tingkan peradilan dan upaya hukum dalam islam berdasarkan dalil diantaranya sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. bahwa ketika di Yaman, Ali bin Abi Thalib RA (hakim) memberikan keputusan hukum atas perkara yang terjadi di antara kedua belah pihak yang bersengketa dan ia mempersilahkan mereka berdua untuk melakukan upaya hukum banding kepada Rasulullah SAW, jika memang mereka berdua keberatan dan tidak menerima keputusan hukum yang ia berikan tersebut. Mereka berdua pun lalu melakukan naik banding kepada Rasulullah SAW lalu beliau pun mengukuhkan keputusan hukum yang diberikan Ali bin Abi Thalib RA tersebut. Khalifah Umar bin Khathab RA dalam suratnya yang terkenal kepada Abu Musa Al-Asy'ari RA menyebutkan, “janganlah sekali- kali keputusan hukum yang telah kamu putuskan kemarin kemudian kamu melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dirimu sendiri lalu kamu diberi petunjuk kepada kebenaran,

---

<sup>33</sup>Rifqi Qowiyul Iman dan joni, *Kekuasaan Yudikatif dalam Islam Qadha, Tahkim, Mazhalim dan Hisbah* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024), 79–81.

janganlah sekali-kali hal itu menghalangi kamu untuk kembali kepada kebenaran karena kebenaran adalah terdahulu, kembali kepada kebenaran adalah jauh lebih baik daripada bersikukuh dalam kebatilan."

b. Fuqaha mazhab empat membahas tema ini dalam konteks ijtihad atau pembatalan keputusan hukum sebagai berikut, jika hukum yang ditetapkan berlandaskan pada *dalil qath'i, seperti nash, ijma',* atau *qiyas jali (qiyas yang jelas)*, maka hukum tersebut tidak dapat dibatalkan atau dianulir. Pembatalan hukum tersebut akan berarti mengabaikan dalil *qath'i*, yang tidak diperbolehkan. Namun, jika keputusan hukum bertentangan dengan *dalil qath'i*, maka hukum tersebut harus dibatalkan berdasarkan kesepakatan ulama, baik oleh hakim yang membuat keputusan atau hakim lainnya, karena keputusan tersebut bertentangan dengan dalil yang ada.

c. Jika keputusan hukum diambil dalam perkara-perkara yang tidak bersifat *qath'i*, melainkan dalam ranah perkara *ijtihad* atau perkara yang didasarkan pada dalil-dalil zhanni, maka hukum tersebut tidak boleh dibatalkan (pada sistem hakim tunggal atau pengadilan tunggal). Pembatalan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kerancuan dan kekacauan dalam hukum syara' dan merusak kepercayaan terhadap keputusan hakim, yang bisa menyebabkan ketidakpastian dan berlarut-larutnya penyelesaian perkara. Namun, jika sistem pengadilan atau mahkamah bersifat bertingkat, dan kedua belah pihak mengetahui bahwa keputusan hukum belum final dan masih dapat diajukan banding untuk

dibatalkan, maka kerancuan, kekacauan, dan tumpang tindih hukum dapat dihindari, karena keputusan tersebut belum sempurna dan final. Hal ini juga didukung oleh pendapat fuqaha yang memperbolehkan pembatalan keputusan hukum jika terdapat unsur kelalaian atau kesalahan.

d. Apabila keputusan hukum telah memperoleh status final dan pasti dari pengadilan kasasi, maka keputusan hukum sebelumnya untuk kasus serupa tidak bisa dibatalkan, sesuai dengan kaidah "*al-ijtihad la yunqudhu bi mitslihi*" (hasil *ijtihad* tidak bisa dibatalkan dengan hasil *ijtihad* yang lain dalam kasus yang serupa).

#### 4. Bidang *siyāsah idāriyyah*

*Siyāsah idāriyyah* adalah cabang dari siyasah syariah yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi negara. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pengaturan administrasi negara langsung dipegang oleh beliau, yang bertindak sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Dalam pelaksanaan tugas administrasi, Nabi Muhammad SAW menunjuk Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara yang bertugas mencatat berbagai urusan ketatanegaraan.<sup>34</sup>

Secara umum, administrasi negara dapat diartikan sebagai upaya pengaturan, yang bertujuan untuk menciptakan tatanan tertentu. Pengertian lain dari administrasi adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih, berdasarkan prinsip-prinsip rasional, untuk mencapai tujuan yang telah

---

<sup>34</sup>Tiara Ike Oktaviyanti, Tinjauan Siyasah Idariyyah terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng dalam Menangani Kebutuhan Pangan, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2023), 22.

ditentukan. Kata "*idāriyyah*" berasal dari bahasa Arab, yakni *adāra asy-syay'a yudiruhu idārah*, yang berarti "mengatur" atau "melaksanakan sesuatu," termasuk dalam konteks administrasi dan manajemen kepegawaian negara.

*Siyāsah idāriyyah* memiliki tujuan dasar untuk mengatur dalam proses administrasi, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalisasi tertentu untuk mencapai tujuan dalam Islam. Administrasi sejalan dengan konsep *diwan*, yang dalam konteks ini merujuk pada alur kerja pemerintahan. Ruang lingkup *diwan* dalam administrasi negara meliputi hal-hal berikut:<sup>35</sup>

- a. *Diwan* yang berhubungan dengan sistem rekrutmen dan penggajian tentara.
- b. *Diwan* yang terkait dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, wilayah kewenangannya, serta sistem penggajian dan tunjangan bagi mereka.
- c. *Diwan* yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai.
- d. *Diwan* yang mengatur pengelolaan keuangan, termasuk pemasukan dan pengeluaran dalam *Bait al-Mal*.

---

<sup>35</sup> Ibid., 25.



### BAB III

#### ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*

##### A. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pengujian Kembali Aturan tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020

Adanya pengujian kembali aturan tentang rangkap jabatan Wakil Menteri terdapat pada dua Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 76/PUU-XVIII/2020, memiliki keterkaitan yang erat karena sama-sama menyoroiti isu konstitusionalitas terkait peran dan regulasi Wakil Menteri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Jika pada Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 fokusnya adalah pada pengujian konstitusionalitas Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara, maka pada Putusan Nomor 76/PUU-XVIII/2020 permasalahan lebih lanjut terkait praktik rangkap jabatan Wakil Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara menjadi isu sentral. Dengan demikian, kedua putusan ini saling melengkapi dalam upaya memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Berikut adalah penjelasan dari kedua ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 dan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020, yaitu:

## 1. Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Bayu Segara, S.H. dan Novan Lailathul Rizky dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019, pengujian terhadap Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara dianggap pemohon bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi "Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara," serta Pasal 28D ayat (1) yang menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."<sup>1</sup>

Ihtisar Putusan pada Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Persyaratan Pengangkatan Wakil Menteri yaitu sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Pemohon dalam perkara ini adalah warga negara Indonesia. Pemohon I menjabat sebagai Ketua Forum Studi Hukum dan Konstitusi (FKHK), sementara Pemohon II merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta. Pemohon mengajukan permohonan uji konstitusional terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Undang-Undang 39/2008), sehingga Mahkamah memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menguji permohonan tersebut.

---

<sup>1</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri, 17.

<sup>2</sup>Ibid., 87-93.

- b. Berdasarkan telaah, kedudukan hukum para Pemohon terkait dengan substansi permohonan yang diajukan. Mahkamah akan mempertimbangkan aspek kedudukan hukum tersebut bersama dengan substansi permohonan. Oleh karena itu, secara prima facie, Pemohon dianggap memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, terlepas dari argumen yang diajukan.
- c. Sebelum masuk ke pembahasan konstusionalitas lebih lanjut, Mahkamah memperhatikan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang 39/2008. Pada perkara sebelumnya, yaitu Perkara Nomor 79/PUU-IX/2011, konstusionalitas undang-undang tersebut telah diuji dengan putusan yang dijatuhkan pada 5 Juni 2012. Karena pasal tersebut sudah pernah diuji, Mahkamah harus memastikan bahwa permohonan kali ini memenuhi kriteria dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 agar dapat diuji kembali.
- d. Pada Perkara Nomor 79/PUU-IX/2011, dasar pengujian melibatkan Pasal 17 dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam permohonan ini, dasar pengujian mencakup Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dasar pemikiran dalam perkara sebelumnya menekankan hak pegawai negeri sipil nonkarier atau pegawai negeri sipil untuk memperoleh kesempatan setara dalam pemerintahan, terutama untuk posisi wakil menteri. Sebaliknya, permohonan baru ini berfokus pada penegakan konstusionalisme

sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014. Karena perbedaan asas pengujian dan dasar pemikiran konstitusional ini, meskipun permohonan baru ini belum tentu memiliki dasar hukum yang kuat secara substantif, secara formal permohonan tersebut tetap dapat diajukan kembali sesuai Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

Jika dilihat dari aspek hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 telah secara rinci mempertimbangkan argumen yang disampaikan Pemohon. Pemohon mengakui bahwa pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 tidak keliru, tetapi Pemohon menafsirkan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, jika dibandingkan dengan pertimbangan hukum dalam putusan-putusan lain, dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah menilai bahwa argumen yang diajukan oleh Pemohon terkesan kurang konsisten. Di satu sisi, Pemohon mengakui pertimbangan hukum Mahkamah terhadap norma yang diuji. Namun, di sisi lain, Pemohon meminta Mahkamah untuk meninjau kembali pertimbangan tersebut dengan menggunakan dasar pertimbangan yang diambil dari Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, yang merujuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Ibid., 93.

Menurut Mahkamah, tidak terdapat pertentangan dengan pertimbangan dalam Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 yang pada intinya menegaskan kembali bahwa untuk mencapai tujuan bernegara yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara yang tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 tetap dapat dibenarkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden dianggap sah, meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, mengingat Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 berwenang untuk melakukannya.<sup>4</sup>

Mahkamah telah mengukuhkan penyelesaian masalah konstitusional terkait Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, dan tidak terdapat alasan baru yang dapat mengubah pendirian Mahkamah. Oleh karena itu, dalil-dalil yang diajukan Pemohon mengenai inkonstitusionalnya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan.<sup>5</sup>

Dengan demikian, Mahkamah perlu memperjelas fakta yang dikemukakan Pemohon mengenai tidak adanya larangan merangkap jabatan bagi wakil menteri yang memungkinkan wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris atau direktur pada suatu badan usaha milik negara atau swasta. Terkait hal tersebut, meskipun wakil menteri membantu menteri

---

<sup>4</sup>Ibid., 94.

<sup>5</sup>Ibid., 96.

dalam memimpin tugas kementerian, namun karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden, maka seperti halnya menteri, wakil menteri seharusnya ditempatkan pada jabatan yang setingkat dengan menteri. Dengan status tersebut, maka semua larangan merangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, harus berlaku pula bagi wakil menteri. Penerapan ketentuan ini bertujuan agar wakil menteri dapat berkonsentrasi pada beban kerja yang memerlukan perhatian khusus di kementeriannya masing-masing, sehingga dapat menjadi dasar pengangkatan wakil menteri pada kementerian tertentu.<sup>6</sup>

Setelah mencermati pokok-pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu menilai kedudukan hukum para Pemohon sebelum mengambil kesimpulan atas permohonan tersebut. Terkait kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah tidak menemukan bukti yang dapat memperkuat dalil gugatan kerugian konstitusional Pemohon I sebagai warga negara Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Studi Hukum dan Konstitusi (FKHK). Khususnya, tidak ditemukan bukti yang mengaitkan kegiatan atau kajian yang dilakukan secara langsung dengan jabatan menteri dan/atau wakil menteri dalam rangka pengujian konstitusi tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan ini. Sementara itu, Pemohon II yang merupakan aktivis mahasiswa dan pemilih dalam pemilu juga tidak

---

<sup>6</sup>Ibid.

dapat menguraikan secara rinci dalil kerugian konstitusional yang ditimbulkan akibat berlakunya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Tidak terdapat hubungan kausalitas yang jelas antara tuntutan kerugian yang diajukan Pemohon II dengan norma yang dimohonkan untuk diuji, baik secara faktual maupun secara potensial. Oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan bahwa Pemohon II juga tidak dapat bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan ini.<sup>7</sup>

Dengan mempertimbangkan pertimbangan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut di atas. Apabila Para Pemohon memang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, maka permohonan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Mahkamah menyimpulkan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Meskipun demikian, jika para Pemohon memiliki kedudukan hukum, permohonan mereka tetap tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan bahwa permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Ibid., 97.

<sup>8</sup>Ibid., 98.

## 2. Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh Victor Santoso Tandiasa, S. H., M. H., permohonan tersebut terkait dengan pengujian konstitusional Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam putusan ini, Mahkamah lebih menegaskan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 terkait dengan masalah rangkap jabatan wakil menteri. Ringkasan Putusan ini adalah sebagai berikut:

Pemohon adalah warga negara yang dikenal dengan profesinya sebagai pakar hukum tata negara, aktivis, dan influencer, dan dalam perkara ini menunjuk Sdr. Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H. Sebagai kuasa hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara tersebut di atas. Terkait yurisdiksi Pengadilan, karena permohonan Pemohon terkait pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Pengadilan berwenang untuk mengadili permohonan tersebut.<sup>9</sup>

Terkait kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 telah menimbulkan ketidakpastian hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 karena Wakil Menteri masih merangkap jabatan dalam praktik. Pemohon yang merupakan pakar hukum tata negara

---

<sup>9</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020 tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri, 1.

sekaligus kuasa hukum dalam Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019 juga merupakan aktivis yang berdedikasi tinggi dan peduli terhadap kepentingan publik terkait penegakan nilai-nilai konstitusi. Selain itu, Pemohon merupakan influencer dengan kanal YouTube "Konstitusionalis TV" yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya konstitusionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Mahkamah, Pemohon hanya menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami akibat pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Mahkamah berpendapat bahwa uraian pemohon tentang kerugian tersebut tidak spesifik, aktual, dan bahkan potensial disebabkan oleh penerapan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Pemohon hanya memberikan uraian yang samar-samar tentang kerugian tersebut tanpa menguraikan secara rinci kerugian yang sebenarnya dialami. Terkait status hukum Pemohon sebagai pemengaruh, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional yang mendasari kedudukan hukum Pemohon dalam menggugat pasal tersebut. Berdasarkan putusan pengadilan, pemohon hanya akan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang dasar apabila dapat membuktikan kerugian yang nyata, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007.

Selanjutnya, Mahkamah merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengikat penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah, dan tidak mengikat warga negara secara umum. Namun, bukan berarti konstusionalitas undang-undang ini tidak dapat digugat oleh warga negara. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstusionalitas undang-undang tersebut apabila memiliki kepentingan hukum langsung maupun tidak langsung terhadap undang-undang tersebut. Dalam perkara ini, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon yang merupakan warga negara, pakar hukum tata negara, pegiat, dan influencer, tidak memiliki kepentingan hukum, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap isi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, khususnya pasal yang dipersoalkan. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan tersebut, namun karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan substansi permohonan. Oleh karena itu, Pengadilan telah memutuskan untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dilihat dari kedua ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 diambil sebagai respons terhadap masalah rangkap jabatan Wakil Menteri, yang timbul karena Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 hanya secara tegas melarang Menteri untuk merangkap jabatan. Ketidakjelasan hukum terkait status Wakil Menteri yang juga memegang jabatan lain pun muncul. Putusan ini menegaskan bahwa

larangan rangkap jabatan yang berlaku untuk Menteri juga berlaku untuk Wakil Menteri, dengan fokus pada penafsiran Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang sebelumnya hanya mengatur larangan rangkap jabatan untuk Menteri. Meskipun ada keputusan tersebut, dalam praktiknya, Wakil Menteri masih terdapat yang merangkap jabatan.

Oleh karena itu, dilakukan peninjauan ulang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 mengenai rangkap jabatan Wakil Menteri, karena ada pengabaian terhadap putusan tersebut, yang salah satunya didasarkan pada alasan bahwa gugatan tersebut "tidak diterima" serta anggapan bahwa ketentuan larangan rangkap jabatan dianggap *inkonstitusional* (bertentangan dengan konstitusi). Meskipun permohonan tidak diterima dalam putusan Mahkamah Konstitusi, pembacaan putusan tetap memerlukan pemahaman dan ketaatan terhadap asas-asas yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, meskipun putusan tersebut tidak diterima, hal ini tidak berarti bahwa dalil-dalil yang diajukan dalam putusan tersebut bisa diabaikan. Bahkan, dalam keputusan tersebut, disebutkan bahwa posisi Wakil Menteri sejajar dengan Menteri, mulai dari persyaratan, standar, hingga larangan yang berlaku. Sebab, Wakil Menteri dapat menggantikan Menteri jika Menteri berhalangan, sehingga tidak ada perbedaan dalam persyaratan atau larangan selama menjabat. Namun, penegasan Mahkamah Konstitusi terkait larangan rangkap jabatan bagi Menteri dan Wakil Menteri yang terdapat dalam pertimbangan

hukum Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 dianggap oleh Pemerintah hanya sebagai usulan dan tidak bersifat mengikat.<sup>10</sup>

Menurut penulis, pandangan tersebut jelas keliru dan perlu diperbaiki. Pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat mengikat. Hal ini dikarenakan seluruh bagian dari suatu putusan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan tersebut menjadi bagian dari keputusan secara keseluruhan. Oleh karena itu, keputusan tersebut bersifat mengikat sejak dibacakan dan harus dilaksanakan sesuai dengan isi yang tercantum dalam keputusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah sehingga menimbulkan polemik ditengah masyarakat.

Menurut Wahiduddin Adams, SH, MA, Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat setelah diumumkan dalam sidang umum. Namun, tidak seperti pengadilan biasa, di mana terdapat proses banding, putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang Dasar 1945 tidak bersifat mutlak. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonan tidak diterima atau menolak permohonan memungkinkan untuk diperiksa kembali oleh pemohon lain, atau berdasarkan dasar konstitusional yang berbeda. Proses pemeriksaan ulang ini memberi kesempatan bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan suatu persoalan konstitusi dari sudut pandang yang berbeda, meskipun pasal atau bagian

---

<sup>10</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020 tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri, 16.

undang-undang yang diuji tetap sama. Oleh karena itu, keputusan yang dihasilkan bisa berbeda dari keputusan sebelumnya.”<sup>11</sup>

Pandangan yang disampaikan oleh Wahiduddin Adam di atas didasarkan pada hukum acara Mahkamah Konstitusi, yang mengacu pada asas hukum *ne bis in idem*, yang berarti pasal-pasal yang telah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat diuji kembali, kecuali ada dasar atau alasan lain yang sah. Meskipun demikian, pengujian tersebut tetap dimungkinkan. Hal ini tercantum dalam Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa materi yang telah diuji, baik ayat, pasal, maupun bagian undang-undang, dianggap tidak dapat dipertimbangkan kembali. Namun, ketentuan ini dapat dikecualikan jika materi yang menjadi dasar pemeriksaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbeda.”<sup>12</sup> Ketentuan serupa juga terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Pasal 78 Tahun 2021, yang juga memberikan pengecualian jika materi yang dijadikan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki muatan yang berbeda atau terdapat alasan lain dalam permohonannya.<sup>13</sup>

Perbedaan antara kedua putusan tersebut terletak pada objek pengujian yang diajukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019. Dalam putusan tersebut, dasar pengujian adalah Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 17

---

<sup>11</sup>Wahiduddin Adam, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*, ( Jakarta: Pusdik MKRI, t.th), 4.

<sup>12</sup>Undang-Undang No 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>13</sup>Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berisi sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian dianggap bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) karena penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, seperti yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, menunjukkan bahwa pembuat undang-undang tidak bisa menambah atau mengurangi wewenang atau nomenklatur pembantu presiden. Mahkamah harus menafsirkan ketentuan yang mengatur lembaga negara dengan menjaga sistem ketatanegaraan yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menggunakan penafsiran yang komprehensif, tekstual, dan gramatikal yang tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, termasuk tentang kewenangan lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar.

2. Tidak ada ketentuan yang mengatur jabatan wakil menteri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yang mengarah pada pemahaman bahwa wakil menteri dapat merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di perusahaan negara atau swasta. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang melarang rangkap jabatan. Menurut para pemohon, faktanya terdapat

---

<sup>14</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 tentang larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri, 89.

dua wakil menteri di kementerian Badan Usaha Milik Negara yang merangkap jabatan sebagai komisaris utama Bank Mandiri dan wakil komisaris utama PT Pertamina. Hal ini menimbulkan keraguan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Sementara yang menjadi dasar pengujian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020 adalah Pasal 23 Undang-Undang No 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Pasal 1 ayat (3), dan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berisikan sebai berikut:<sup>15</sup>

1. Bahwa Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak adanya penegasan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, menimbulkan perbedaan pendapat dan sikap dalam memaknai pasal tersebut, sehingga kekuatan hukum mengikat pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal Ini berarti bahwa upaya pemohon untuk mempertahankan prinsip konstitusionalisme tentang adanya rangkap jabatan Wakil Menteri telah sia-sia ,sebab faktanya bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam keputusan 80/PUU-XVII/2019 diabaikan karena tidak mempengaruhi keberlakuan Pasal 23 undang-undang Kementerian Negara yang tetap dimaknai

---

<sup>15</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020 tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri, 31-32.

sebagaimana tertulis secara eksplisit yakni hanya Menteri yang dilarang rangkap jabatan, tidak termasuk wakil menteri.

2. Bahwa Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi harus menyelesaikan ketidakpastian hukum ini dengan menyatakan bahwa frasa "Menteri dilarang merangkap jabatan" dalam ketentuan Norma Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara bertentangan dengan konstitusi selama tidak dimaknai "termasuk wakil menteri".

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa pada umumnya pasal atau substansi undang-undang yang telah diuji tidak dapat diuji kembali. Namun, pengecualian berlaku jika materi yang diuji konstusionalitas Undang-Undang Dasar 1945 yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan berbeda.

Meskipun dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 dinyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima, sama seperti putusan sebelumnya, karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*lawful standing*) yaitu pemohon hanya mengajukan permohonan yang berkaitan dengan implementasi dan menguraikan kerugian secara umum, serta tidak memiliki kepentingan hukum baik langsung maupun tidak langsung terkait materi Undang-Undang No 39 Tahun 2008 sebenarnya, seluruh isu dalam permohonan tersebut sudah ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, sangat penting untuk menegaskan bahwa pertimbangan hukum adalah dasar, alasan, atau "inti" dari suatu keputusan Mahkamah Konstitusi,

yang tidak dapat dipisahkan dari amar putusan. Lebih lanjut, pertimbangan hukum tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, setara dengan amar putusan, karena keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan saling mendasar.

Dalam tinjauan *fiqh siyāsah* hakim konstitusi merupakan bagian dari lembaga *al-sultāh al-qadhā'iyah* yaitu lembaga yudikatif yang bertugas mengadili suatu sengketa. *Al-sultāh al-qadhā'iyah* mempunyai peran tidak hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memastikan penerapan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>16</sup> Fungsi yudisial ini dibuat untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana hak-hak setiap orang dan kelompok dalam masyarakat dilindungi dan kewajiban mereka dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Pada pengujian kembali putusan mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XVII/2019 menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020 sudah sesuai dengan *fiqh* Islam, yang menjelaskan bahwa penerapan prinsip Upaya Hukum dalam peradilan, berdasarkan dalil bahwa dalam suatu peristiwa di Yaman, Ali bin Abi Thalib RA mengambil keputusan hukum mengenai sengketa antara dua pihak dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan banding kepada Rasulullah SAW jika mereka tidak puas dengan putusannya. Setelah banding diajukan, Rasulullah SAW menegaskan kembali keputusan Ali. Selain itu juga menasehati Abu Musa Al- Asy'ari RA agar tidak

---

<sup>16</sup>La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah AL-Qada'iyah," Journal Tahkim,1 (Juni 2017), 169.

ragu untuk merevisi keputusan yang telah diambil jika ia menemukan kebenaran, karena kembali kepada kebenaran adalah lebih baik daripada tetap berpegang pada kebatilan.<sup>17</sup>

Dalam kajian *fuqara mazhab* empat juga dijelaskan mengenai *ijtihad* dan pembatalan keputusan hakim, terdapat prinsip bahwa keputusan yang berdasarkan *dalil qath'i* tidak dapat dibatalkan karena akan mengabaikan dalil yang jelas. Jika keputusan tersebut bertentangan dengan *dalil qath'i* harus dibatalkan. Untuk perkara *ijtihad*, pembatalan tidak diperbolehkan dalam sistem hakim tunggal agar tidak menimbulkan kerancuan. Namun, dalam sistem pengadilan bertingkat, keputusan yang belum final dapat dibuka melalui banding. Pembatalan juga diperbolehkan jika terdapat kesalahan. Setelah keputusan final dari kasasi, keputusan sebelumnya tidak bisa dibatalkan sesuai dengan kaidah *al-ijtihad la yunqudhu bi mitslihi*.<sup>18</sup> Secara keseluruhan, prinsip naik banding sejalan dengan sistem peradilan modern dan tidak bertentangan dengan prinsip islam.

Dari penjelasan kisah diatas menurut penulis Pengujian Kembali Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi No.76/PUU-XVII/2020 yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah sudah sesuai dengan *al-sultah al-qadhā'iyah* (lembaga peradilan Islam) yang menunjukkan bahwa hakim dapat melakukan pengujian kembali walaupun putusan hakim konstitusi bersifat final dengan melakukan banding, sehingga dengan begitu sudah tidak ada kekhawatiran lagi akan terjadi

---

<sup>17</sup>Rifqi Qowiyul Iman dan joni, *Kekuasaan Yudikatif dalam Islam Qadha, Tahkim, Mazhalim dan Hisbah* (Banyuwangi: Wawasan Ilmu, 2024), 80.

<sup>18</sup>Ibid., 81.

tumpang tindih hukum karena keputusan hakim yang belum sempurna, hal ini mungkin dapat di perkuat lagi dengan apa yang ditetapkan oleh fuqara tentang bolehnya membatalkan suatu putusan hakim itu terdapat unsur kelalaian atau tampak ada kesalahan didalamnya.

## **B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Implementasi Putusan Mahkamah**

### **Konstitusi tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri.**

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang larangan rangkap jabatan Wakil Menteri, dalam implementasinya masih banyak yang dilanggar. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 telah menetapkan larangan bagi Wakil Menteri untuk merangkap jabatan di perusahaan negara maupun swasta, dengan tujuan agar Wakil Menteri dapat fokus pada tugas dan tanggung jawabnya di kementerian masing-masing. Namun, hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa larangan tersebut belum sepenuhnya diterapkan. ICW menemukan empat Wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di antaranya Rosan P. Roeslani (Wamen BUMN) di PT Pertamina, Suahasil Nazara (Wamen Keuangan) di PT PLN, Muhammad Herindra (Wamen Pertahanan) di PT Len Industri, dan Kartika Wirjoatmodjo (Wamen BUMN) di PT BRI.<sup>19</sup>

Selain itu, ICW juga mencatat bahwa terdapat 34 pejabat dari Kementerian BUMN yang menduduki posisi komisaris atau dewan pengawas

---

<sup>19</sup>Ninuk Cucu Suwanti, "ICW Beberkan 4 Wakil Menteri Rangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN, padahal Putusan MK Melarangnya," *kompas.id*, dalam <https://www.kompas.tv/nasional/452844/icw-beberkan-4-wakil-menteri-rangkap-jabatan-sebagai-komisaris-bumn-padahal-putusan-mk-melarangnya>, (diakses pada tanggal 1 Desember 2024).

di BUMN dan anak perusahaannya, yang tidak hanya melanggar aturan MK tetapi juga Pasal 17 huruf a Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009, serta prinsip etika pemerintahan yang diatur dalam TAP MPR Nomor VI Tahun 2001. ICW menyoroti dampak negatif dari rangkap jabatan ini, termasuk konflik kepentingan, gangguan pada profesionalisme, persaingan tidak sehat, diskriminasi pendapatan, dan penurunan kepercayaan publik, serta ancaman terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti transparansi dan akuntabilitas.<sup>20</sup>

Dalam laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) per 5 September 2023, teridentifikasi bahwa dari 263 komisaris dan dewan pengawas di BUMN, sebanyak 142 orang atau 53,9% menjalankan rangkap jabatan. Rinciannya, 53% komisaris merangkap jabatan, sementara 60% dewan pengawas melakukan hal yang sama. Rangkap jabatan tersebut meliputi posisi di kementerian, lembaga negara, dan perusahaan swasta. Dari total tersebut, 117 orang berasal dari kementerian atau lembaga negara, 20 orang dari perusahaan swasta, dan 5 orang merangkap jabatan di keduanya. Jabatan yang paling sering merangkap adalah Deputy (21 orang), Direktur Jenderal (18 orang), dan Staf Khusus (18 orang). ICW menegaskan bahwa rangkap jabatan tidak hanya melanggar hukum dan etika, tetapi juga mengganggu prinsip keadilan serta tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, ICW merekomendasikan

---

<sup>20</sup>Ibid.

adanya reformasi dalam pengelolaan BUMN, khususnya terkait proses pengangkatan komisaris dan dewan pengawas.<sup>21</sup>

Dalam tinjauan *Fiqh Siyāsah*, Wakil Menteri termasuk dalam jabatan publik yang tergolong dalam lembaga eksekutif. Wakil Menteri adalah pejabat yang membantu Menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dalam perspektif *Fiqh Siyāsah*, jabatan Wakil Menteri termasuk dalam kategori *siyāsah tanfidziyyah*, yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Islam, Wakil Menteri disebut sebagai *wazīrah* atau *wāzīr*.<sup>22</sup> Menteri dalam pemerintahan Islam terbagi menjadi dua jenis yaitu Menteri *tafwīdhi* (*plenipotentiary*, dengan mandat penuh) dan Menteri *tanfidzi* (pelaksana). Mengenai jabatan wakil menteri itu disebut dengan menteri *tanfidzi*. Menteri *tanfidzi* harus memiliki tujuh sifat yaitu *Amanah*, Jujur, Tidak tamak pada dunia, Bebas dari permusuhan, Tidak memiliki konflik atau percekocokan dengan orang lain, Menyampaikan laporan, Cerdas, Bebas dari pengaruh hawa nafsu.<sup>23</sup>

Menurut kitab *Fiqh Siyāsah* tentang rangkap jabatan wakil menteri, dalam Islam tidak mendukung adanya rangkap jabatan karena tidak sesuai dengan sifat yang dimiliki oleh seorang menteri *tanfidzi* dapat menyebabkan pembagian kekuasaan dan mencampur adukkan kewenangan dalam

---

<sup>21</sup>Muhammad Darisman, "ICW: Separuh Komisaris BUMN sampai Wamen Rangkap Jabatan, Bertentangan dengan MK," *kumparan*, dalam <https://kumparan.com/kumparanbisnis/icw-separuh-komisaris-bumn-sampai-wamen-rangkap-jabatan-bertentangan-dengan-mk-21ObImU1Bwg/full>, (diakses pada tanggal 6 Desember 2024).

<sup>22</sup>Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, revisi (jakarta: Prenadamedia Grup, 2003), 77.

<sup>23</sup>Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Darul Falah, 2020), 45.

pemerintahan. Wakil menteri yang bertugas di pemerintahan harus mampu memberikan contoh perilaku kepemimpinan yang baik dan tidak melakukan pelanggaran administratif atau pelanggaran lain yang dapat melemahkan tata kelola pemerintahan yang baik. Secara lebih luas, prinsip-prinsip yang diatur dalam *Fiqh Siyāsah* juga bertujuan untuk menjamin pemerintahan yang adil dan efisien serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, larangan ini tidak hanya membatasi siapa yang dapat menduduki jabatan rangkap, tetapi juga menjadi penghalang untuk menjamin keseimbangan dan keadilan dalam pemerintahan.

Sanksi yang didapatkan dalam penyalahgunaan kekuasaan (rangkap jabatan) dalam *fiqh siyāsah* dilihat dari prinsip-prinsip hukum Islam yang secara tidak langsung disebutkan dalam *Al-Qur'an* dan *Hadist* yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Prinsip *Maslahah Mursalah*, prinsip ini menekankan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mencapai *maslahah* (kemanfaatan) bagi seluruh umat manusia. Rangkap Jabatan dapat dibenarkan jika memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Namun dilihat dari kenyataannya rangkap jabatan dapat menimbulkan kerugian dan mengurangi efektifitas pelayanan, karena harus membagi waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya diberbagai kekuasaan yang dijalani, serta akan menghabiskan lebih banyak anggaran negara untuk menggaji seseorang yang merangkap jabatan yang diambil dari pajak masyarakat.

---

<sup>24</sup>Mualif, "Prinsip-Prinsip Hukum Islam," dalam <http://an-nur.ac.id/prinsip-prinsip-hukum-islam/>, (diakses pada tanggal 11 Desember 2024).

2. Prinsip *adil* (keadilan), prinsip ini mengharuskan setiap orang diperlakukan secara adil dan setara dihadapan hukum, tanpa diskriminasi. Rangkap jabatan dapat menimbulkan ketidakadilan jika seseorang memiliki akses dan pengaruh yang lebih besar karena jabatan rangkapnya. Seperti yang dijelaskan dalam *Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5:8)*<sup>25</sup> yang artinya “Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu tidak berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada taqwa.”

3. Prinsip *Amanah* (Kepercayaan), prinsip ini mengharuskan setiap orang untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Namun rangkap jabatan dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengkhianati amanah jika seseorang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dikedua jabatan tersebut. Dijelaskan dalam *Al-Qur'an Surah Al-Anfal (8:27)*<sup>26</sup> yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”

Prinsip-prinsip hukum Islam diatas menunjukkan bahwa rangkap jabatan yang berpotensi merugikan dapat dianggap melanggar hukum islam. Sanksi administratif yang dapat diterapkan antara lain:

1. Teguran, pejabat yang terbukti melakukan penyalahgunaan kekuasaan (rangkap jabatan) dapat diberi teguran lisan maupun tertulis.

---

<sup>25</sup>QS. Al-Maidah ayat 8, dalam <http://quran.nu.or.id/al-maidah/8>, (diakses pada tanggal 6 Desember 2024).

<sup>26</sup>QS. Al-Anfal ayat 27, dalam <http://quran.nu.or.id/al-anfal/27>, (diakses pada tanggal 6 Desember 2024)

2. Penjabatan Kewenangan, pejabat dapat dicabut kewenangannya untuk menjalankan tugas tertentu.
3. Pemberhentian, pejabat yang terbukti melakukan rangkap jabatan yang serius dapat diberhentikan dari jabatannya.

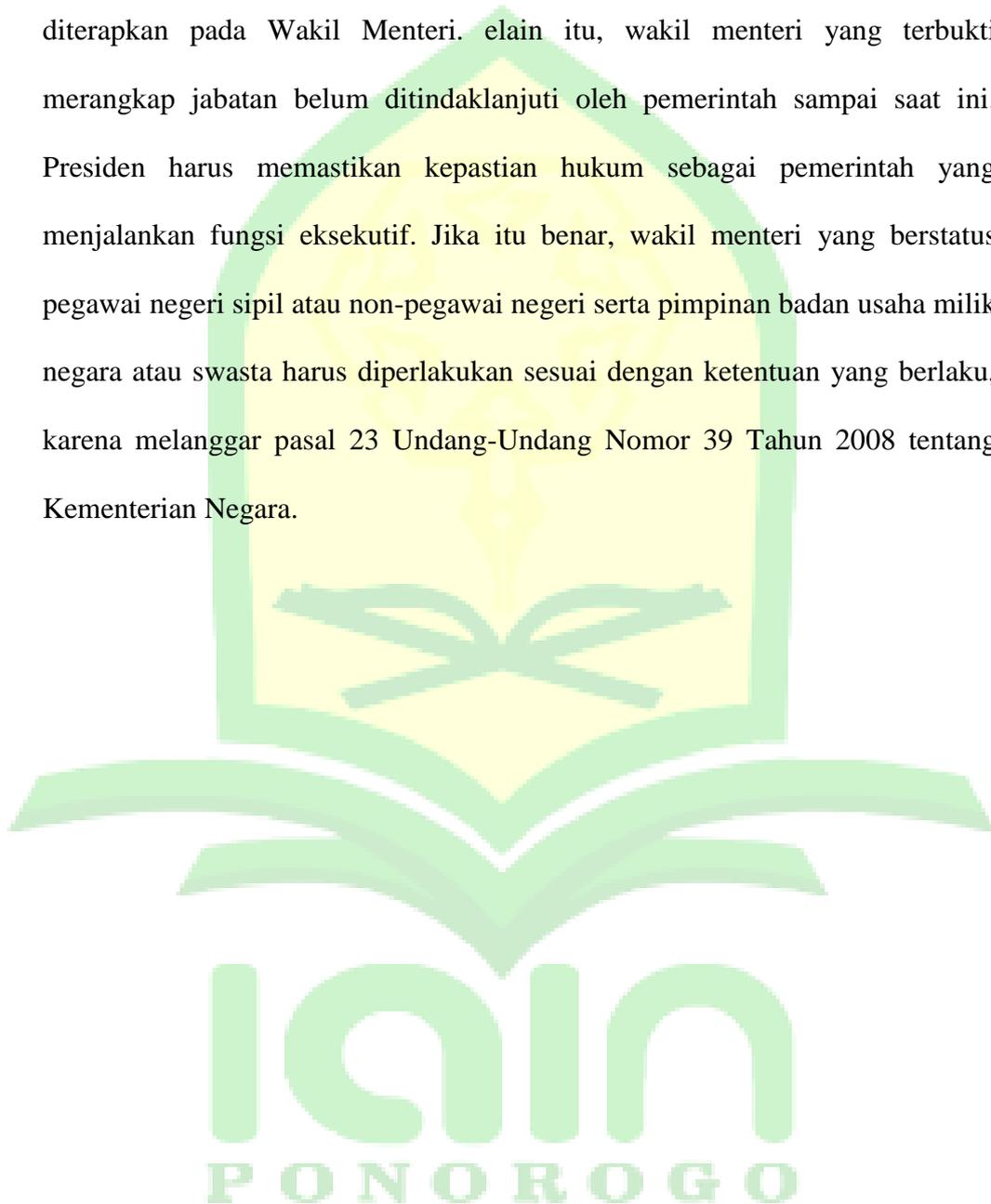
Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tentang Larangan rangkap jabatan yang ditujukan untuk Menteri diatas berlaku juga untuk Wakil Menteri setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 yang menyatakan kedudukan Wakil Menteri itu sama dengan Menteri. Maka seseorang yang menjabat sebagai Wakil Menteri yang melanggar ketentuan yang berlaku, baik Wakil Menteri yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil maka ia akan dikenakan sanksi administratif diatas, termasuk memberikan kesempatan untuk memilih jabatan mana yang diprioritasnya. Ataupun bisa diadili secara perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebab rangkap jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pejabat Negara, termasuk pelanggaran terkait dengan aturan kepegawaian dan tata pemerintahan. Pada dasarnya, Peradilan Tata Usaha Milik Negara adalah lembaga peradilan yang ditugaskan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara antara individu dan pemerintah (eksekutif).<sup>27</sup>

Namun hingga saat ini, belum ada kepastian hukum yang jelas tentang di mana Wakil Menteri yang melanggar aturan rangkap jabatan bisa diadili. Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 telah

---

<sup>27</sup>PTUN Surabaya, “Tugas Pokok dan Fungsi,” dalam <http://www.ptun-surabaya.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, (diakses pada tanggal 10 November 2024)

menyatakan melarang rangkap jabatan Wakil Menteri, tetapi putusan ini tidak mengikat secara langsung. Dalam praktiknya rangkap jabatan masih terjadi di pemerintahan, dan belum ada kejelasan tentang bagaimana aturan ini diterapkan pada Wakil Menteri. Selain itu, wakil menteri yang terbukti merangkap jabatan belum ditindaklanjuti oleh pemerintah sampai saat ini. Presiden harus memastikan kepastian hukum sebagai pemerintah yang menjalankan fungsi eksekutif. Jika itu benar, wakil menteri yang berstatus pegawai negeri sipil atau non-pegawai negeri serta pimpinan badan usaha milik negara atau swasta harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena melanggar pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengujian kembali putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi No.76/PUU-XVIII/2020 terkait rangkap jabatan Wakil Menteri, dalam perspektif *fiqh siyāsah*, merupakan langkah yang selaras dengan prinsip keadilan dalam Islam. Proses ini mencerminkan mekanisme evaluasi hukum yang tidak hanya bertujuan untuk mengoreksi kesalahan, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan mendukung kemaslahatan umat. Dalam konteks hukum modern, langkah ini dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad siyasah yang bertujuan untuk menjaga integritas hukum, kepercayaan publik, dan stabilitas sistem pemerintahan. Dengan demikian, pengujian ulang ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat diterapkan secara relevan dalam sistem hukum modern, khususnya dalam menjawab tantangan-tantangan yang muncul dalam tata kelola negara.
2. Larangan rangkap jabatan wakil menteri dalam *fiqh siyāsah* didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang menjadi dasar tata kelola pemerintahan Islam. Dalam konteks hukum modern, larangan ini juga sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengutamakan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, implementasi larangan ini tidak hanya penting untuk menjaga integritas sistem pemerintahan, tetapi juga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat. Untuk memastikan implementasi yang efektif, diperlukan kepastian hukum yang tegas, baik melalui penguatan regulasi maupun penegakan hukum yang konsisten. Dengan demikian, analisis *fiqh siyāsah* memberikan landasan yang relevan bagi reformasi sistem pemerintahan modern untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan efisien sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas, penulis memberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Mahasiswa disarankan untuk lebih mendalami konsep *fiqh siyāsah*, terutama dalam konteks penerapannya di Indonesia. Hal ini akan membantu memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan dalam sistem hukum modern.
2. Mahasiswa disarankan untuk berdiskusi dari disiplin ilmu lain seperti ilmu politik, dan sosiologi agar dapat perspektif yang lebih luas mengenai pengaruh hukum Islam dalam tata kelola negara dan kepercayaan publik.
3. Pemerintah perlu menyeimbangkan idealisme dengan realitas dalam membuat dan menjalankan kebijakan. Dengan mempertimbangkan aspek praktis, kebijakan akan lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Adam, Wahiduddin. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Jakarta: Pusdik MKRI, 2020.
- Al Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Darul Falah, 2020.
- Annajah. *Pengertian dan Latar Belakang Fikih Siyasah*. Kediri: KreasiAds Team, 2023.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003.
- Hayatudin, Amrullah, Panji Adam. *Pengantar Kaidah Fikih*. Jakarta:Amzah, 2021.
- Iman, Rifqi Qowiyul Iman, Joni. *Kekuasaan Yudikatif dalam Islam*. Banyumas:Wawasan Ilmu, 2024.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Johni, Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjar Masin: Antasari Press, 2011.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Book, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. *Independensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: MKRI, 2011
- Wahyuni, Tri. *Rangkap Jabatan: Batas Antara Hukum dan Etika dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Samarinda: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN, 2017.

Zakaria, M. *Peradilan Dalam Politik Islam (Al qadhaiyyah Fis siyasah Assar'iyah)*. Jakarta: Pengadilan Agama Jakarta Utara, 2019.

### **Referensi Artikel Ilmiah**

Ariansyah dan Usman Jafar. "Kedudukan Menteri AD Interim dalam Sistem Pemerintahahan (Telaah Siyasah Syar'iyah)." *Siyasatuna*, Vol.1(2022).

Arunde, Elisyah, Donald A. Rumokoy, Toar N. Palilingan. "Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi." *Lex Administratum*, Vol. 12. No. 4 (2024).

Charity, May LimIroni. "Praktik Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Legislasi Indonesia*, Vol. 13. No.1 (2016).

Darmadi, Nanang Sri. "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Hukum*, Vol. 26. No. 2, (2011).

Fachruroji, Moch. "Trilogi Kepemimpinan Islam." *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 12, (2008).

Fitrianita, Ika, Jayanti Puspitaningrum, dan Suwito. "Dualisme (Rangkap) Jabatan Wakil Menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Terhadap Pengujian Undang-Undang No 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara." *Journal of Law Review* Vol. 1. No.1 (2022).

Ghafar, Taufik dan Heri Firmansyah. "Tinjauan Fiqh Siyasah pada Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah." *UNES Law Review*. Vol. 2 (2024).

Isra, Saldi. "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi." *Hukum Dan Peradilan*, Vol.4. No. 1 (2015).

Lendrawati. "Khilafah, Imarah dan Imamah dalam Konstelasi Politik Islam Analisis Komperatif tentang Wacana Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 2 (2021).

Mariadi. "Lembaga Wilayahul Hisbah dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh." *Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 3. No.1 (2018).

Masyrofah, dan Gilang Rizki Aji Putra. "Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Wizarah dan Kedudukan Wazir." *Adalah*, Vol. 6. No. 3 (2022), 44–53.

Nggilu, Novendri M. "Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Konstitusi* Vol. 16. No. 1 (2019).

Rakhmawati, Atin Rakhmawati. "Implementasi Lembaga Hisbah Dalam Meningkatkan Bisnis Islami." *Mulia*, Vol. 7. No. 2 (2016).

Sari, Sonia Sekar, Aminuddin Ilmar, Eka Merdekawati Djafar, dan Pan Mohamad Faiz. "Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions: Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20. No. 4 (2023).

Sarif, Akbar, Ridwan Ahmad. "Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imah Al-Ghazali." *Peradapan Islam*, Vol. 13. No. 2 (2017).

Samsu, La. "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah." *Journal Tahkim*, Vol. 13. No. 1 (2017).

Sudin, Ervin Nugroho dan Septi Nur Wijayanti. "Komparasi Kedudukan Wakil Menteri Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020." *Social Humanities, Religious Studies and Law*, Vol. 2. No. 1 (2022).

Sukma, Novira Maharani, dan Retno Saraswati. "Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 79/PUU-IX/2011." *Undip E-Journal System Portal*, vol. 2 (2014).

#### **Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

Amri, Syaiful. "Fiqh Siyasah." Diktat, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2023.

Dewi, Kartika Sari. "Syarat-Syarat Menjadi Hakim dalam Hukum Positif dan Hukum Islam." *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018.

- Heryati. "Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Kartika. "Rangkap Jabatan Kepala Desa dan Camat Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perspektif Fiqh Siyasah." Skripsi, universitas islam negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2023.
- Merliani, Selfi. "Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Menertibkan Parkir Liar." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021.
- Rizky, Amalia Endah. "Analisis Yudiris Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Siyasah Dusturiyyah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.
- Sidqi, Muhammad Nizamuddin. "Rangkap Jabatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara Perspektif Hukum Positif Dan Mashlahah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Sujono, Imam. "Mahkamah Konstitusi Pengawal dan Penafsir Konstitusi." Tugas Kuliah, Universitas Bhayangkara, 2019.
- Windi Agustin, Yuliana. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Larangan Rangkap Jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

### **Referensi Peraturan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- Undang-Undang No 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang nomor 39 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-Undang nomor 39 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar.

### **Referensi internet**

Bawaslu, Apa Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi, Kedudukan, Kewenangan, dan Kewajibannya, dikutip dari <http://donggala.bawaslu.go.id/berita/apa-tugas-dan-fungsi-mahkamah-konstitusi-kedudukan-kewenangan-dan-kewajibannya-1>, [diakses tanggal 12 September 2024]

Chryshna, Mahatma. Wakil Menteri, Menteri Muda, dan Menteri Negara dalam Kabinet di Indonesia, *kompas.id*, dikutip dari <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/10/30/wakil-menteri-menteri-muda-dan-menteri-negara-dalam-kabinet-di-indonesia/>, [diunduh tanggal 6 Desember 2024]

Darisman, Muhammad, ICW: Separuh Komisaris BUMN sampai Wamen Rangkap Jabatan, Bertentangan dengan MK, *kumparan*, dikutip dari <https://kumparan.com/kumparanbisnis/icw-separuh-komisaris-bumn-sampai-wamen-rangkap-jabatan-bertentangan-dengan-mk-21ObImU1Bwg/full>, [diunduh tanggal 6 Desember 2024]

Kastanya, Efraim Jordi Kastanya, Asas *Ne Bis In Idem* dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-menguji-kembali-pasal-yang-sama-ke-mk-lt50225d6ee0840/>, [diunduh tanggal 9 November 2024]

Kompas TV, ICW Beberkan 4 Wakil Menteri Rangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN padahal putusan MK melarangnya, dikutip dari <https://www.kompas.tv/nasional/452844/icw-beberkan-4-wakil-menteri-rangkap-jabatan-sebagai-komisaris-bumn-padahal-putusan-mk-melarangnya>, [diunduh tanggal 17 Oktober 2024].

Mualif, “Prinsip-Prinsip Hukum Islam,” dikutip dari <http://an-nur.ac.id/prinsip-prinsip-hukum-islam/>, [diunduh pada tanggal 11 Desember 2024].

PTUN Surabaya, Tugas Pokok dan Fungsi, Dikutip dari <http://www.ptun-surabaya.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, [diunduh tanggal 10 November 2024].

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Kabinet Presidensial, dikutip dari <https://setkab.go.id/kabinet-presidensial/>, [diunduh tanggal 10 September 2024].

Suwanti, Ninuk Cucu, ICW Beberkan 4 Wakil Menteri Rangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN, padahal Putusan MK Melarangnya, *kompas.id*, dikutip dari <https://www.kompas.tv/nasional/452844/icw-beberkan-4-wakil-menteri-rangkap-jabatan-sebagai-komisaris-bumn-padahal-putusan-mk-melarangnya?page=all>, [diunduh tanggal 1 Desember 2024].

Universitas Negeri Malang, Keabsahan Data, dikutip dari <http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/Keabsahan-Data-Kualitatif.pdf>, [diunduh tanggal 10 September 2024].



## BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Widyningsih Nur Chasanah  
Tempat tanggal lahir : Sragen, 8 November 2001  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Dk. Tanjung, Rt.22/07, Ds. Kedungupit,  
Kec. Sragen, Kab. Sragen,



Prov. Jawa Tengah.

Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat email : widyningsih.nur.chasanah.spega@gmail.com  
No. Telepon : 081328235892

Riwayat pendidikan

TK : TK. Darma Wanita Kedungupit Sragen (2006-2008)  
SD : SDN. Kedungupit 1 Sragen (2008-2014)  
SMP : SMPN. 3 Sragen (2014-2017)  
SMA : MA. Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo (2017-2020)  
Perguruan Tinggi : IAIN Ponorogo (2020-2024)

Biodata Orang Tua

Nama Ayah : Wakidi  
Nama Ibu : Sunarti  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta

Alamat : Dk. Tanjung, Rt.22/07, Ds. Kedungupit, Kec. Sragen,  
Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah.

Ponorogo, 17 Desember 2024

Yang Bersangkutan

**Widyningsih Nur Chasanah**

103200042